

Rumusan Hasil
Kongres Kebudayaan Desa
1 Juni-15 Agustus 2020



KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Menghadirkan Rasa Aman
dan Perlindungan Masyarakat



KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Menghadirkan Rasa Aman dan
Perlindungan Masyarakat

Webinar Seri 5
Kongres Kebudayaan Desa 2020
1-10 Juli 2020



KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Menghadirkan Rasa Aman dan Perlindungan Masyarakat

©Sanggar Inovasi Desa 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Diterbitkan oleh Sanggar Inovasi Desa 2020

Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93,

Panggungharjo, Yogyakarta

Web: www.sanggarinovasidesa.id

| | |
|---------------------------|--|
| Penanggung jawab | : Faiz Ahsoul |
| Penyunting | : Fawaz |
| Penyelia aksara | : Suhairi Ahmad |
| Desain & ilustrasi sampul | : Ketjilbergerak, Arif Gunawan, dan Agus Teriyana |
| Tata letak isi | : Prima Hidayah |

Cetakan pertama, Agustus 2020

Ukuran Buku:

13 x 19 cm, xxxiv + 95 hlm.

ISBN:

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan dalam batas ketentuan yang berlaku.



Pengantar Editor

Fawaz

Entah sejak kapan konstruksi eksotisme desa mulai terbentuk, tetapi Orde Baru berhasil memasarkan konstruksi eksotisme desa itu secara sistematis dan terpola. Orde Baru mengonstruksi desa sebagai “surga” di bumi. Desa adalah tempat yang asri, sejuk, hening, hijau dan rimbun, sawah terhampar, gunung tinggi menjulang, pantai indah mudah diakses, tempat kita bisa rekreasi, memancing, dan berbagai macam hal lainnya tempat kedamaian dan kebahagiaan berasal. Di desa pula tempat kita berkunjung ke

rumah kakek dan nenek, pulang ke kampung halaman, tempat kita bisa bertemu petani, nelayan, dan orang-orang yang serba baik dan serba menyenangkan. Apa ada desa atau dusun atau kampung yang seideal yang digambarkan di atas? Saya rasa tidak.

Celakanya, banyak karya sastra, film, seni dan sebagainya yang diproduksi di masa Orde Baru melanggengkan konstruksi desa atau kampung halaman semacam itu. Kampung halaman dikesankan eksotis dan indah, alami, dan lestari. Desa seakan berada dalam sebuah akuarium besar yang indah dipandang sebagai penyejuk mata pemberi ketenangan. Tak bisa disentuh dan jangan disentuh perubahan karena jika itu terjadi, akuarium akan pecah dan desa akan hancur berantakan.

Konstruksi ini kini semakin diperparah oleh banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memandangi desa. Mereka memasukkan desa dalam sebuah preparat penelitian untuk kemudian mendedahnya, memberikan penilaian, dan terutama menjadi legitimasi tunggal yang berhak menilai desa, tanpa mau mendengar suara dari para penghuninya. Desa harus eksotis, harus asri dan lestari dan mesti dipertahankan selalu seperti itu.

Di lain pihak, konstruksi tentang desa bertolak belakang dengan konstruksi eksotisme desa. Desa atau kampung halaman adalah gambaran jelas akan ketertinggalan, kejumudan, kebodohan, kemiskinan yang dirangkum dalam satu frasa dengan sudut pandang kolonialisme: primitif. Desa sulit diajak maju, tak bisa dimengerti, dan semua hal yang tampak usang ada di sana sehingga mesti lekas



ditinggalkan. Dalam karya sastra, film, seni, karya-karya anak negeri prakemerdekaan hingga pascakemerdekaan juga banyak yang menggambarkan desa seperti itu.

Nyatanya, data empiris di lapangan, di desa-desa, sama sekali tidak seperti gambaran-gambaran di atas. Jika kita berkunjung langsung ke desa, tinggal dalam jangka waktu cukup lama di sana, dan melihat langsung keseharian kehidupan di desa, kita akan menemukan desa dengan kondisi yang berbeda dengan desa pada dua konstruksi di atas.

Selain kesederhanaan, kesahajaan, eksotisme, desa juga menyimpan masalah, ada problematika yang cukup rumit di sana. Ada penjahat, orang-orang oportunistis, dan terutama, masalah pemenuhan kebutuhan dasar, dan ragam bentuk konflik dengan latar belakang beragam. Di desa kekerasan juga terjadi, seperti di tempat-tempat lain.

Pada titik tertentu, desa memang memberi kedamaian bagi para penghuninya, desa juga menopang kehidupan di kota lewat geliat pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh para penghuninya. Ini terlihat jelas ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada 1998, desa menampung dan bisa menghidupi manusia-manusia yang terimbas krisis di kota dan mesti kembali ke desa untuk bertahan hidup. Tapi sekali lagi, desa bukan sesuatu yang bersih dari masalah, tidak melulu kebaikan-kebaikan yang ada di sana, bukan hanya eksotisme-eksotisme yang ditawarkan desa. Ia kompleks seperti juga tempat-tempat lain di muka bumi.



Saya kemudian kembali mengingat-ingat beberapa kunjungan ke desa-desa yang ada di negeri ini. Alih-alih desa sebagaimana yang digambarkan dan dikonstruksi oleh Orde Baru, atau konstruksi desa tempat berkumpulnya keprimitifan dan keterbelakangan, saya menemukan desa-desa dengan ragam bentuk kompleksitasnya.

Pada Kongres Kebudayaan Desa, webinar seri 5 dengan tema Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Perlindungan Masyarakat Desa, kompleksitas desa disodorkan dengan lebih jelas lagi, terutama pada konteks keamanan dan ketertiban di desa. Bagi saya, ini sebuah tema yang menarik. Mengapa ini menarik? Dalam kondisi seperti ini, dunia yang dikecup oleh wabah pandemi korona, desa kembali ramai dibicarakan, tetapi biasanya dalam konteks ketahanan pangan, desentralisasi, otonomi, ketahanan ekonomi, yang semuanya bermuara pada kemampuan desa dan para penghuninya dalam menghadapi wabah korona ini. Akan tetapi, isu keamanan dan ketertiban di desa jarang sekali jadi perbincangan. Padahal ini salah satu kunci kesuksesan sebuah desa dalam banyak hal, adanya jaminan keamanan dan ketertiban.

Kongres Kebudayaan Desa, Webinar Seri 5 dengan tema Keamanan dan Ketertiban, menghadirkan bahasan yang menarik dengan para pembicara yang kompeten di bidangnya masing-masing. Ada Era Purnamasari dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Najib Azca, seorang akademisi dan sosiolog, Lian Gogali dari Institut Mosintuwu, Poso, dan Nus Uku dari Jaringan Baileo Maluku.



Dalam tulisannya, Era Purnamasari memaparkan temuan-temuan YLBHI terkait laporan dan aduan yang mereka terima sepanjang 2019 hingga Maret 2020. Dari temuan itu terlihat masih ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak perorangan, kriminalisasi, pelanggaran terhadap kebebasan sipil, hingga penangkapan sewenang-wenang. Ini artinya belum ada jaminan keamanan dan ketertiban. Yang lebih mencengangkan lagi, dalam suasana pandemi korona seperti sekarang ini, perampasan-perampasan lahan oleh aparat atau pihak swasta terhadap lahan-lahan milik rakyat di desa malah meningkat. Konsentrasi masyarakat yang terfokus pada pandemi malah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk merampas lahan milik rakyat.

Pada tulisan selanjutnya, Najib Azca menyoroti keragaman desa-desa di negeri ini. Keragaman itu meliputi keragaman tradisi dan kebudayaan, keragaman bentang alam dan profil komunitas, hingga keragaman penamaan istilah ‘desa’ di beberapa tempat di Indonesia. Keragaman itu bisa menjadi anugerah, namun di lain sisi juga bisa menjadi ancaman. Keragaman di Indonesia memicu kerawanan sosial yang jika tidak dikelola dengan baik, malah menjadi bumerang yang bisa menghancurkan tatanan utuh negeri ini.

Lian Gogali dan Nus Ukru dalam tulisannya membawa kisah dari lapangan, tempat mereka melakukan kegiatan, di Poso dan di Maluku. Mereka menjabarkan mengapa konflik bisa terjadi di lokasi-lokasi tempat mereka bertugas. Apa pemicunya dan mengapa bisa



berlarut-larut. Setelah itu mereka merefleksikan temuan-temuan di lapangan tentang proses perdamaian yang pada akhirnya terjadi.

Saya kira, empat tulisan yang terhimpun dalam buku ini, cukup baik menggambarkan bagaimana keamanan dan ketertiban desa itu bisa tercapai, dan bagaimana gangguan-gangguan terhadap keamanan dan ketertiban itu juga terus-menerus berdatangan. Ada solusi yang ditawarkan untuk menanggulangi gangguan itu, dan desa menjadi poros utama penanggulangan gangguan-gangguan tersebut.[]

Yogyakarta, 7 Agustus 2020





Sekapur Sirih

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Ada ungkapan Jawa tentang desa yang menyatakan: “Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata”. Dalam UU Otonomi Desa No. 6/2014, ada kewenangan desa secara luas untuk mengatur cara dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi tidak berarti keluar dari tata ketatanegaraan NKRI. Sebelumnya, khusus untuk desa-desa di Yogyakarta, sudah ada landasan UU Keistimewaan DIY No.

13/2012 sehingga UU Desa menjadi lebih spesifik dalam arti ada perubahan mendasar dari *Pangreh Projo* menjadi *Pamong Praja*. Termasuk penyesuaian nomenklatur Jabatan Camat pada level bawah maupun nama beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di provinsi dan kabupaten/kota. Bukan hanya perubahan nama, tetapi pelayanannya pun menjadi lebih berbudaya Jogja. Oleh karena itu, semua perangkat wajib mengikuti *short course* di Pawiyatan Pamong sehingga sesanti *desa mowo coro negara mawa tata* lebih tampak nuansanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara tematik, membaca desa adalah sebuah introspeksi atas eksistensinya selama ini. Mengeja Indonesia dengan melafalkan per huruf membentuk kata I-n-d-o-n-e-s-i-a, merupakan bentuk evaluasi perannya sebagai wadah keragaman desa se-Nusantara. Semuanya itu harus ditempatkan pada era “normal baru” daripada aspek kebudayaan.

“*New normal*” adalah *back to normal* karena kehidupan kemarin justru *abnormal*, menandai sebuah *hiper realita*, seperti ketika kita harus membeli *image* sebuah produk air yang—seolah—meningkat statusnya setelah menjadi produk kemasan. Sebuah kondisi mental yang membuat sesuatu tidak substansif, menjadi melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. “*New normal*” adalah sebuah terapi psikis dan kultural *healing*, berefek kejut untuk merefleksi dan mengintrospeksi betapa rapuhnya kehidupan kita kemarin, untuk itu kembalilah ke jati diri dan fungsi diri kita yang nyata. Dunia kemarin sudah mati.



Dunia hari ini ibarat sebagai sebuah rumah sakit besar, kita tergeletak di dalamnya dan hanya berpikir sehat dan agar tetap bisa hidup.

Di situlah kini desa berada, yang berimbas pada tata pergaulan dan tata pemerintahan desa. Akhirnya kita menjadi bagian dari generasi yang dipertemukan oleh situasi terbaru dengan perubahan relasi sosial, dinamika organisasi kerja, dan berbagai hal yang selama ini telah kita lalui. Konsekuensinya, Kongres Kebudayaan Desa harus membahas pergeseran budaya desa yang tentu tidak mudah.

Menurut pakar kebudayaan August Comte, Disanayake, maupun Alvin Toffler, setiap pergeseran peradaban ditandai oleh tahapan yang selalu mengedepankan rasionalitas. Bahwa iptek merupakan komponen utama majunya peradaban. Semakin baik penguasaan akan beragam iptek, masyarakat akan semakin mendekati tahap adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Cara berpikir fungsional inilah yang harus kita hidupkan dan kembangkan di setiap desa agar sejalan dengan konsep *townbie*, membangun kelompok kreatif berbasis kebudayaan seperti contoh *Jogja gumregah*.

Pada masa awal, tentu canggung dan getir, bahkan sakit untuk *melakoninya*. Sebagaimana watak perubahan, harus melewati proses bertahap, terasa ada ketidaknyamanan yang mau tidak mau kita harus hadir menjadi bagian dalam proses tersebut. Potret perubahan dan ketidaknyamanan tersebut, tampak jelas dalam proses Kongres



Kebudayaan Desa yang salah satunya menghasilkan 21 buku rumusan Indonesia Menuju Tatanan Baru dari Desa.

Dampak Covid-19 berkelindan dengan disrupsi teknologi menuju era Industri 4.0 yang belum mapan. Itu pun sudah dibayang-bayangi era Sosial 5.0 yang segera menyusul. Perubahan total ini juga berkejaran dengan pergeseran budaya desa yang belum teridentifikasi secara cermat. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah, termasuk desa, harus bersinergi memastikan pemeriksaan kesehatan masyarakat: tersedianya sarana medis, tersedianya jaring pengaman sosial untuk melindungi—mereka—yang paling rentan, dan tersedianya perlindungan kesehatan. Selebihnya, berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapa pun dan berpotensi menimbulkan kecemasan publik.

Gambaran strategis lingkungan desa yang telah berubah harus diikuti perubahan tata masyarakat, antara lain dengan relokasi dan *refocusing* Dana Desa. Dampak ekonomi membawa dampak sosial yang positif dalam meningkatkan peradaban empati, diikuti kesediaan saling belajar, menghargai, dan berbagi sebagai penguat modal sosial dan partisipasi publik. Penguatan ini berdampak positif pada peningkatan daya tahan ekonomi warga karena terbangunnya jaringan kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan. Kebijakan “normal baru” atau adaptif menghadapi realitas perubahan, tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan kehendak membangun hidup *guyub* di tengah keragaman perbedaan yang didasari oleh *mutual*



trust untuk memperoleh *mutual benefit*. Untuk itu kita harus siap mengubah *mindset* budaya dalam mengelola kehidupan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, lurah atau kepala desa, harus memiliki wawasan adaptasi dan kapasitas daya tahan. Bekal kompetensi dalam dunia yang kompleks dan penuh kejutan serta perubahan yang tidak terduga merupakan syarat utama. Harus mampu melakukan lompatan *non-linier* bahkan *out of the box*. Dari *Terra Firma*, daratan yang dikenal dengan baik, ke *Terra Incognita* atau dunia masa depan. Demikianlah, semoga buku rumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa ini bermanfaat bagi desa, bangsa, dan negara Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan semoga sukses. Sekian, terima kasih. *Wassalam.*[]

Yogyakarta, 5 Agustus 2020

Hamengku Buwono X
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta





Sekapur Sirih

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Melawan korupsi dari desa.

Pergeseran nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan menjadi “pekerjaan rumah” kita bersama. Semakin banyak anak-anak muda kota yang meski tumbuh di desa, tetapi terjangkit penyakit materialisme. Tercerabutnya suasana dan pikiran desa membuat

banyak orang berpikir: apa yang ada dalam pikiran mereka hingga tercerabut dari budaya desanya, padahal berasal dari desa?

Kira-kira apa masalahnya di Indonesia? Keteladanan kepala desa dan orang tua menjadi sangat penting. Guru agama pun tak kalah penting. Di kota semakin hilang keteladanan dan sikap apresiasi sehingga muncul materialisme di masyarakat kota. Tentu butuh obat dengan sikap keteladanan dan orang yang sudah harus selesai dengan dirinya. Sikap spiritual ini banyak ditemukan di desa, harmonisasi alam dan manusia di desa baiknya tidak sekadar jadi inspirasi, tetapi harus dipraktikkan.

Materialisme yang menghantui pikiran orang kota bukan pepohonan dan sawah, melainkan mengumpulkan logam-logam. Bentley, Lamborghini, dan mobil-mobil mewah lainnya semua ada di parkiran Komisi Pemberantasan Korupsi, sitaan dari kasus korupsi. Kumpulan mobil itu menjadi tidak penting. Namun, mengapa masih ada orang-orang yang ingin memilikinya dengan cara salah: korupsi? Apakah ada yang salah dengan pikiran orang kota? Kita perlu rekonstruksi bagaimana pikiran orang desa yang simpel: naik angkot, truk, dan moda transpor publik lainnya yang lebih fungsional.

Mari kita tengok pemikiran ekonom peraih Nobel: *When enough is not enough, a hedonist is born*. Ketika cukup sudah dianggap tidak cukup maka penyakit cinta dunia materialistis akan tumbuh. Pemenang Nobel ini sangat spiritual, seperti ajakan kembali ke desa dan mendalami pemikiran sederhana orang-orang desa. Namun pada



prinsipnya, urusan menimbun kekayaan adalah penyakit semua orang, baik orang kota maupun orang desa.

Tantangan yang tidak kalah besar di desa, salah satunya *money politic*. Ternyata sistem politik yang kita pilih kemudian menular. Pemilihan bupati, gubernur, sampai tingkat pusat penuh syarat *money politic*. Berharap untuk pilkades tidak ada *money politic*. Namun, harapan itu membentur kenyataan. Bahkan saling menularkan, baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Jadi, apakah desa menjadi inspirator korupsi karena *money politic* pilkades?

Sebenarnya sumber permasalahan ada pada politik yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kepala desa tidak ada gaji, tetapi dibayar dengan bengkok. Bengkok untuk pembangunan desa kemudian diasosiasikan menjadi milik kepala desa. Kalau panen padi tiga kali dalam setahun, dihitung paling tidak pendapatan 200 juta. Kemudian dikalikan berapa ton pemimpin ketemu angka, kalau dikeluarkan 1 miliar maka untung sedikit. Itu dari bengkok. Sementara dari dana desa maupun beberapa bantuan pembangunan infrastruktur dari pusat bisa menjadi bumerang dan jebakan pikiran koruptif. Ini harus kita pecahkan bersama karena tantangan di desa hari ini berbeda dengan dahulu.

Sistem politik yang kita pilih mahal, sistem terbuka. Sementara pendanaan negara untuk partai politik rendah. Konversi suara ternyata sering kali tidak berbanding lurus dengan pendanaan secara rasional kepada partai politik. Contohnya, gaji bupati 6,5 juta, gubernur 8,5 juta, dan wakil presiden 40 juta yang dinilai tidak laik



dengan proses ketika mereka terpilih. Negara harus sudah mulai memikirkan kepala desa digaji yang cukup. Di Surabaya contohnya: lurah digaji 30 juta, camat bisa 50 juta, tetapi di desa-desa lain bagaimana? Sehingga yang terjadi, tidak sedikit kasus kepala desa hasil pemilihan secara *money politic*, kemudian melakukan upaya-upaya yang merusak perilaku masyarakat desa itu sendiri.

Mengapa 36 persen pelaku korupsi yang ditahan KPK adalah kader politik, anggota DPR, dan kepala daerah? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Angka politik sangat memengaruhi angka persepsi indeks korupsi Indonesia, jadi varietas demokrasi proyek angkanya 28, sementara dari lulusan ekonomi ratingnya 59. Jadi angka-angka ini merupakan perbandingan korupsi yang diperbandingkan setiap negara. Untuk kasus Indonesia cukup menarik karena terus menanjak, ini jarang terjadi di negara lain.

Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, terbaik di dunia untuk pergerakannya. Dari 17 ke 40, naik 23 poin. Cina memberantas korupsi dengan hukuman mati naik 7 poin. Kemudian Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir bisa *reborn* setelah di zaman Najib turun 47. Itu pun hanya menaikkan Malaysia di angka 2 poin saja. Jadi, Indonesia sudah benar dalam pemberantasan korupsi, tetapi terlalu kaya dengan isu kota sehingga di desa juga perlu dilibatkan pemberantasan korupsi. Untuk itu, ada tiga strategi yang dilakukan KPK: Penindakan agar koruptor jera, pencegahan agar orang tidak melakukan korupsi, pendidikan agar orang tidak



ingin korupsi. Demikian sekapur sirih dari kami untuk 21 judul buku hasil rumusan Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih.[]

Jakarta, 5 Agustus 2020

Giri Suprpdiono

Direktur Dikyanmas KPK





Sekapur Sirih

Menteri Desa, PDTT

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Pertama-tama, mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020. Ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa, titik pijak atau titik tolak dari kebangkitan desa-desa yang memiliki akar budaya, di mana perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa

jangan sekali-kali lepas dari tumpuan akar budaya desa setempat. Mudah-mudahan kongres ini merupakan awal untuk kongres kebudayaan desa tahun-tahun berikutnya. Kedua, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang memberi cetak tebal kebudayaan manusia di muka bumi.

Melalui kongres desa, kita semua sudah diberikan pandangan dan paradigma baru dalam melihat dunia, termasuk kebudayaan. Kita tentunya semakin sadar bahwa di balik pandemi Covid-19 terdapat ujian sekaligus hikmah. Kita belum tahu kapan tuntasnya, tetapi kita harus mengambil langkah konkret dan strategis, salah satunya dengan merumuskan tatanan baru. Dan tentu saja kita berharap pandemi segera berlalu.

Sebagaimana dijelaskan selama kongres, pandemi Covid-19 sudah sampai pada level mendekonstruksi tataran budaya manusia. Tidak hanya kebudayaan semata, tetapi ekososial politik juga terdekonstruksi. Untuk itu, ada beberapa hal terkait rumusan kongres agar bisa berkontribusi terhadap paradigma baru Indonesia pascapandemi.

Pertama, melalui kongres kita berharap bisa mengidentifikasi nalar tebal kebudayaan masyarakat desa, seperti gotong royong atau *holopis kuntul baris*, saling peduli antarsesama masyarakat desa, sekaligus membaiknya ekosistem politik di mana masyarakat desa mampu berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Kedua, kongres diharapkan mampu berkontribusi untuk pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik, dan inovatif



yang hari-harinya dijalankan masyarakat desa. Dengan kata lain, di balik keriuhan negara mengurus problem bangsa, masyarakat desa punya model dan modul pendekatan khas yang berasal dari cara mereka menghadapi persoalan. Ini *problem solving* yang spesifik khas desa, contoh ketika ada masalah tidak terlalu berat, cukup selesai di desa. Hukum positif tidak selalu menjadi rujukan. Misalnya, ada pencuri ayam, tidak serta-merta diurus ke kantor polisi, dimasukkan sel. Melainkan diselesaikan di desa dengan sanksi sosial yang diputuskan oleh kepala desa, yang karena kemampuan dan kewibawaan yang dimilikinya sehingga keputusan diterima oleh masyarakat.

Ketiga, forum Kongres Kebudayaan Desa yang melibatkan beragam unsur keterwakilan: akademisi, praktisi, seniman, budayawan, pemangku adat, dan elemen pemerintahan dari pusat sampai desa. Untuk itu, saya berharap agar semua unsur saling berkolaborasi. Para praktisi menceritakan bagaimana desa melaksanakan kenormalan baru di desa. Akademisi bisa mereformulasi dan meredesain bagaimana kebijakan yang adaptif bagi desa. Sebagai keterwakilan pemerintah, kami berharap ada perhatian khusus pascakongres agar lebih serius dan terelaborasi dengan kebijakan untuk kesejahteraan desa di Indonesia.

Terakhir, kami dari Kemendesa PDTT terus mencari dan mengidentifikasi narasi tentang desa, masyarakat desa, dan dinamikanya mengikuti perkembangan zaman yang bisa kita formulasikan menjadi kebijakan. *Tagline* “Desa untuk Semua



Warga atau Desa Surga” merupakan inti sari pemajuan kebudayaan desa, pemajuan masyarakat desa dengan memperhatikan kearifan lokal. Dana desa jangan hanya dirasakan elite desa, tetapi dirasakan kehadirannya oleh seluruh masyarakat desa, itu inti dari surga, desa untuk semua warga desa.

Terima kasih kepada Sanggar Inovasi Desa, pemerintah Desa Panggunharjo, dan Jaringan Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kongres dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga kongres dengan hasil rumusannya yang terbingkai dalam 21 judul buku ini menjadi momentum berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa yang akan datang. Demikian sekapur sirih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, salam budaya desa. []

Jakarta, 5 Agustus 2020

Abdul Halim Iskandar

Menteri Desa, PDTT





Pidato Kebudayaan

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud

*A*ssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Terima kasih telah mengundang saya dan memberi kesempatan bicara di depan Kongres Kebudayaan Desa. Saya baca kerangka acuan dengan saksama, saya melihat kebudayaan tidak dipahami semata kesenian atau warisan budaya. Namun, juga sebagai keseluruhan cara hidup,

cara berpikir menyangkut kebiasaan kita, ritual, dan praktek yang terkait kebudayaan. Jadi kebudayaan dalam pengertian luas, sama seperti semangat dari UU No. 5/2017, tentang pemajuan kebudayaan Indonesia.

Pertama, kita paham bagaimana Pandemi Covid-19 mengubah cara hidup kita secara drastis. Kita membatasi pertemuan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, menjaga jarak, dan kita juga punya beberapa keseragaman. *Physical distancing*, *lockdown*, dan seterusnya, semua masih dalam bahas Inggris, bahasa asing. Ini menunjukkan respons kita pada situasi pandemi masih cenderung datang dari luar, belum sepenuhnya menjadi sesuatu yang berakar pada masyarakat kita, dari dalam. Padahal kita mempunyai khazanah pengetahuan luar biasa menghadapi situasi pandemi. Tidak sedikit orang mengatakan, situasi yang kita hadapi tidak ada bandingannya.

Kedua, pada situasi luar biasa, kita perlu langkah-langkah luar biasa juga. Pemikir Inggris mengatakan, untuk mengatasi situasi Covid-19, kita perlu sebuah revolusi perdesaan. Revolusi ini landasan kita untuk tatanan masa depan. Karena revolusi bukan sesuatu luar biasa. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar seruan revolusi, terakhir revolusi mental. Jadi, tidak ada yang luar biasa dengan gagasan revolusi. Yang luar biasa adalah ketika gagasannya diutarakan oleh seorang bankir. Orang terkaya kedua di desa.

Gagasan mengenai revolusi perdesaan bisa kita tengok dalam sebuah tulisan yang dimuat di situs *World Economic Forum*. Ini keluar dari kebiasaan lain, forum ekonomi dunia dikenal oleh kepala pemerintahan dunia sebagai kumpulan para pebisnis, ekonom, yang



membentuk sistem untuk mendominasi, jelas bukan forum untuk revolusi. Kita tidak mungkin kembali ke masa sebelum Covid-19, ke masa yang sebelum normal lama, dan kita perlu sebuah tantangan baru, tantangan yang lebih manusiawi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena kata kunci tatanan baru adalah keselamatan.

Bisa dibayangkan, ketika semua orang mendapat kesempatan mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Kita akan mudah sekali bersepakat untuk hal tersebut. Namun, bagaimana caranya? Jawaban paling jujur kita berikan pada pertanyaan mendasar yang kita belum ketahui bersama. Belum ada yang mengetahui bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana, karena tidak ada atau tepatnya belum ada cetak biru siap pakai. Namun, coba kita pastikan titik tolaknya ada pada desa. Perjalanan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dimulai dari desa. Sekitar 1550 tahun lalu, asal mula pengelompokan masyarakat dalam jumlah besar yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Periode selanjutnya ketika kita ingin membangun negeri modern, tetapi desa dilupakan, diabaikan. Seluruh sumber daya kita keluarkan untuk membangun sektor modern yang oleh Covid-19, diingatkan untuk kembali ke asal usul, kembali ke dasar, kembali ke akar, kembali ke desa, itu alasan utama.

Alasan berikutnya, desa telah menyiapkan kebutuhan dasar untuk normal baru, terutama pangan dan kesehatan. Dua hal pokok ini tidak boleh diserahkan semua pada pasar. Ketika pembatasan sosial diberlakukan, kemudian ada orang panik memborong bahan pangan dan obat-obatan, termasuk yang tidak diperlukan. Sementara yang memerlukan tidak bisa membeli. Penyelesaian masalah seperti



ini tidak sesederhana menangani penyelewengan, tapi ada kelemahan dalam sistem yang harus diperbaiki. Ini semata bukan soal mafia impor beras maupun gas—yang memang harus disingkirkan. Namun, ada yang lebih penting, yaitu menata ulang sistem yang berpihak, yang bisa menegakkan kedaulatan di atas sistem itu sendiri sehingga mengembalikan kemampuan kita mengelola sumber daya yang ada. Fokus utamanya untuk pemenuhan kebutuhan kita semua, terutama kebutuhan di dalam negeri. Selebihnya, bolehlah berbagi dengan negara tetangga, negara sahabat.

Dan saya kira, yang berkumpul sekarang di kongres, adalah para pejuang akar rumput yang sudah lama menekuni masalah ketimpangan dan penyelewengan, yang bergerak mengurus memuliakan kembali benih-benih lokal. Ada yang terlibat praktik agro ekonomi, ada yang mengurus pasar lokal dan nasional untuk melayani kebutuhan masyarakat, penggerak koperasi usaha kecil, BUMDes, semua elemen yang diperlukan dalam tatanan mendatang. Saatnya, kita belajar kembali dari kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan. Hemat saya, ini kerja-kerja kebudayaan.

Pengetahuan tradisional di masa pandemi terlihat memiliki keunggulan. Kasus Covid-19 banyak sembuh karena obat tradisional. Balitbang pertanian sudah identifikasi 50 tanaman herbal untuk penangkal virus. Beberapa perusahaan jamu sudah memproduksi ramuan daya tahan tubuh untuk menghadapi Covid-19. Semua bukan sekadar romantisme, tapi pikiran rasional. Kita tidak mungkin diam menunggu vaksin datang. Sekarang, di banyak tempat, orang-orang mulai menggali pengetahuan dari naskah-naskah, tradisi lisan, dan



berbagai praktik lainnya untuk memperkuat daya tahan terhadap virus. Dan dalam prosesnya, kita menyadari betapa pengetahuan lokal yang selama ini diabaikan ternyata memiliki potensi pengembangan yang luar biasa.

Covid-19 telah memaksa kita melihat kembali jejak dan perjalanan kita. Covid-19 sudah mendesak kita memanfaatkan kekayaan budaya dan intelektual yang kita miliki. Memanfaatkan teknologi mutakhir, bermacam teknologi terbaru, temuan di berbagai bidang, kesehatan, pangan, energi terbarukan, dan pada akhirnya seluruhnya diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan sebagai landasan untuk tatanan baru.

Kalau kita tengok lebih jauh, seluruh praktik baik tatanan baru, mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar. Sebagai contoh, pengobatan berbasis pengetahuan lokal sekarang disebut pengobatan integratif dengan nilai total di dunia mencapai 360 Miliar Dolar. Padahal pengetahuan integratif hanya bagian kecil saja dari industri yang disebut *wellness industry* yang mencakup banyak hal: ada perawatan diri, makanan sehat, pariwisata, dan total nilainya diperkirakan sudah 4,2 Triliun Dolar. Itu data sebelum Covid-19. Dan menurut hemat saya, di masa Covid-19 justru industri berbasis pengetahuan lokal di bidang kesehatan, bidang keselamatan akan semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai kesehatan.

Dalam sebuah studi dan riset, telah memperlihatkan bahwa 40% dari nilai total 4,2 Triliun Dolar atau 1,7 Triliun Dolar Amerika, sama besarnya dengan 25 Ribu Triliun Rupiah. Dan pada tahun 2023 kelak,



nilai tersebut akan berada di Asia Pasifik. Jadi, kue yang cukup besar dari industri *Wellness* tersebut akan ada di Asia Pasifik. Pertanyaannya kemudian, Indonesia sebagai sektor perekonomian terbesar keenam di Asia Pasifik apa rencananya? Padahal, relatif kita punya semua. Keanekaragaman hayati luar biasa, salah satu yang paling besar dan lengkap di dunia. Pengetahuan lokal mengelola alam juga luar biasa. Dan jangan lupa, banyak penemuan di bidang kesehatan modern pun dilakukan di Indonesia. Para peneliti dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia, berinteraksi dengan orang desa, mencatat kebiasaan mereka, kemudian menghasilkan temuan yang sampai sekarang masih punya pengaruh besar dalam kedokteran modern.

Itu semua kita punya, tapi pertanyaannya, apa rencana kita? Saya percaya bahwa fokus para pengembang *Wellness* di Indonesia akan membawa angka pertumbuhan kembali bergerak naik, tapi hendaknya harapan besar ini jangan sampai mengalihkan fokus kita. Kita membangun tatanan baru bukan untuk menjadi yang paling besar. Presiden Jokowi dalam sidang IMF mengingatkan dengan sebuah pertanyaan retoris, untuk apa menjadi yang paling besar di tengah dunia yang tenggelam?

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Tatanan baru yang kita rumuskan memang seharusnya mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan, itu kata kuncinya. Bukan angka pertumbuhan, bukan uang. Covid-19 mengingatkan kita semua bahwa uang bukan segalanya. Punya uang tapi tidak ada yang bisa dibeli, itu pelajaran berharga di masa krisis pandemi. Semua tidak mudah. Kita terbiasa dengan peralatan modern, termasuk uang. Mengubah cara pandang



dan kebiasaan memerlukan perubahan mendasar, perubahan kebudayaan. Karena itu revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Benih-benih kebiasaan baru, kebudayaan baru sudah mulai bertumbuhan. Di tengah pembatasan sosial, kita mulai melihat orang kembali ke alam, bercocok tanam. Kita menangkap ada kerinduan untuk kembali belajar sejarah, kembali belajar kebudayaan, tradisi spiritual dan praktik dalam bermasyarakat. Gerakan sosial juga bertumbuhan di mana-mana. Di Yogyakarta contohnya, ada gerakan Solidaritas Pangan Jogja: membangun dapur umum untuk membantu masyarakat kesusahan. Kita mencatat para seniman memproduksi alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan *face shield* yang terjangkau.

Revolusi perdesaan sudah dimulai. Tugas kita dan tugas kongres kita ini, untuk merajut inisiatif menjadi gerakan efektif. Merajut *science* mutakhir dengan pengetahuan tradisional. Kita merajut teknologi digital dengan pranata lokal. Gerakan ini adalah gerakan interdisipliner, karena tidak ada bidang ilmu atau sektor masyarakat yang bisa menjalankan tugas besar sendirian. Di sinilah semangat gotong royong akan mendapatkan wujud nyata.

Terakhir sebagai penutup, saya memohon bantuan para pegiat desa, para aktivis kepala desa, kepala daerah yang hadir dalam kesempatan kongres ini, untuk memperhatikan balai kebudayaan di desa. Sebagian dari kita punya padepokan, sanggar, dan seterusnya. Saya sangat memohon bantuan kita semua agar seluruh institusi ini bisa bertahan di masa sulit. Bagi yang belum punya padepokan,



sanggar, mohon bantuan agar kantor desa juga bisa berfungsi sebagai balai kebudayaan pusat pemajuan kebudayaan, bukan soal gedung fisik, tapi program dan kegiatannya. Di sinilah harapan saya kita bisa mulai melancarkan revolusi kebudayaan melalui musyawarah, lumbung pengetahuan. Di sinilah saya berharap kreativitas dan energi pembaruan bisa berkonsolidasi. Perangkat desa bisa menjadi agen pemajuan kebudayaan di wilayah setempat, kami siap kerja sama dengan seluruh unsur. Semoga setelah kongres, kita bisa menghasilkan agenda aksi konkret di tatanan baru. Terima kasih. Wassalam. []

Jakarta, 1 Juli, 2020

Dr. Hilmar Farid

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud





DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Pengantar Editor | v |
| Sekapur Sirih | |
| 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta | xi |
| Hamengku Buwono X | |
| 2. Dirwktur Dikyanmas KPK | xvi |
| Giri Suprapdiono | |
| 3. Menteri Desa, PDTT | xxi |
| Abdul Halim Iskandar | |

| | |
|---|------------|
| Pidato Kebudayaan Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud | xxv |
| Dr. Hilmar Farid | |
| Membaca <i>Security</i> Desa: Sebuah Refleksi | |
| Pengalaman Bantuan Hukum | 1 |
| Era Purnamasari | |
| Menghadirkan Rasa Aman dan Ketertiban dalam | |
| Tatanan Baru Desa di Era (Pasca) Pandemi Corona | 16 |
| Muhammad Najib Azca | |
| Poso: Mendekonstruksi Rasa Aman dan Tertib | 28 |
| Lian Gogali | |
| Menghadirkan Keamanan di Tatanan Indonesia Baru: | |
| Refleksi Maluku | 49 |
| Nus Ukru | |
| Epilog | 60 |
| Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Desa | |
| Deklarasi Arah Tatatan Indonesia Baru dari Desa | 90 |
| Kerabat Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 | 94 |





Membaca *Security* Desa: Sebuah Refleksi Pengalaman Bantuan Hukum

Era Purnamasari

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang

mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pasal 1 angka 5)

Pasal di atas saya kutip untuk menjadi rujukan apabila ingin mencari pengetahuan tentang keamanan dan ketertiban yang mudah diakses. Kutipan tersebut juga menjadi pengantar tulisan ini dalam merefleksikan pengalaman saya mengadvokasi kasus-kasus hukum, di samping saya memang bernaung di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Bunyi pasal di atas mengandung kepastian adanya peran negara, tetapi juga tidak melupakan pengakuan terhadap partisipasi masyarakat dalam soal keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban menjadi salah satu hal yang pokok untuk kemaslahatan masyarakat, apalagi di masa pandemi Covid-19 sekarang. Namun, sebelum melangkah ke pembahasan lebih lanjut, saya akan paparkan jumlah laporan pengaduan yang diterima YLBHI pada 2019.

Pengaduan Sepanjang 2019

Ada ribuan pengaduan yang ditampung YLBHI sepanjang 2019, tepatnya berjumlah 4174 pengaduan. Wilayah persebarannya



mencakup 16 kota di seluruh Indonesia, meliputi Papua (183 pengaduan), Palangkaraya (5 pengaduan), Manado (150 pengaduan), Makassar (246 pengaduan), Bali (210 pengaduan), Surabaya (559 pengaduan), Semarang (102 pengaduan), Yogyakarta (200 pengaduan), Bandung (221 pengaduan), Jakarta (1496 pengaduan), Lampung (121 pengaduan), Palembang (74 pengaduan), Pekanbaru (106 pengaduan), Padang (231 pengaduan), Medan (224 pengaduan), dan Aceh (46 pengaduan).

Jakarta menjadi wilayah dengan pengaduan terbanyak di banding kota-kota lain, tetapi bukan berarti selain Jakarta jumlah pengaduannya tergolong sedikit. Berdasarkan tingkat pendidikan, tamatan SLTA/Menengah (SMA) dan tamatan diploma IV/Strata I merupakan kelompok tertinggi dalam memberikan pengaduan, masing-masing 1689 dan 1226. Selain dua kelompok tersebut, terdapat Tamatan Strata II (29), Tamatan Strata III/Sederajat (4), Tamatan Akademi/Diploma III/S. Muda (130), Tamatan Diploma I/II (59), Tamatan SLTP/Sederajat (299), Tamatan SD/Sederajat (193), Tidak Tamat SD/Sederajat (39), Tidak/Belum Sekolah (32), dan lain-lain (2).

Dari segi penghasilan, rata-rata para pencari keadilan berpenghasilan di bawah standar. Fakta ini telah menjadi pemandangan umum karena YLBHI memberi bantuan hukum pada kelompok miskin dan marjinal. Mereka yang termasuk cukup banyak melakukan pengaduan adalah kelompok berpenghasilan Rp2 juta hingga Rp3 juta, sejumlah 939, dan kelompok berpenghasilan



Rp0 hingga Rp500 ribu, sebanyak 731. Besaran penghasilan tersebut mengisyaratkan kerentanan posisi pencari pengadilan berdasarkan kekuatan ekonominya.

Data penghasilan pengadu di atas tampak kontras apabila dibandingkan dengan profil pelaku. Perusahaan swasta merupakan pihak yang kerap dilaporkan sebagai pelaku dalam pengaduan, yaitu sejumlah 85 perusahaan. Keterlibatan perusahaan swasta menunjukkan kenyataan tentang situasi keamanan yang sebenarnya dihadapi masyarakat, termasuk di desa. Apabila diurutkan dari yang tertinggi, di bawah Perusahaan Swasta adalah Warga/Kelompok Sipil, Pasangan/Suami, Polri, Pemerintah Kab/Kota, TNI, Birokrasi Kampus, Orangtua Anak, dan Pemerintah Provinsi. Adanya keterlibatan lembaga publik memberi kecenderungan bahwa konflik yang sejauh ini diadukan bersifat struktural.

Data yang berhasil dihimpun YLBHI menampilkan pula pelanggaran terhadap kebebasan sipil, antara lain pelanggaran hak kebebasan berserikat, berekspresi, dan berkumpul. Modus yang umum terjadi ialah kriminalisasi, penolakan atau pembatalan izin kegiatan, pelarangan kegiatan, intimidasi, penghalangan kegiatan, razia, dan pembubaran paksa kegiatan. Kira-kira sebanyak 51 persen modus kriminalisasi dilakukan dari seluruh data pelanggaran. Bentuknya pun mencakup penangkapan sewenang-wenang, pemeriksaan, hingga menjadikan tersangka atau terdakwa.

Ketika pelanggaran atas kebebasan sipil dilakukan, peluang untuk melakukan pelanggaran yang lain juga akan terbuka. Kasus ini

seperti efek domino. YLBHI menemukan 169 pelanggaran hak atas *fair trial*. Pelanggaran jenis tersebut terdiri dari 12 macam. Sekadar menyebut beberapa saja, antara lain hak untuk tidak ditangkap sewenang-wenang, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak kebebasan dan keamanan pribadi, serta hak diberitahu saat ditangkap, alasan penangkapan dan tuduhan. Selain pada kebebasan sipil masyarakat, terjadi juga pelanggaran terhadap hak atas lingkungan, pekerjaan dan penghidupan, pangan, air, serta udara.

Konflik soal pertanahan merupakan konflik yang selalu terjadi di Indonesia. Ketika konflik-konflik lama belum selesai, sudah bermunculan konflik-konflik baru. Tahun 2019 saja, YLBHI menerima dan mendampingi lebih dari 50 kasus pertanahan. Konflik tersebut melibatkan puluhan ribu hektar lahan, terutama di wilayah pedesaan, lantaran sebagian besar adalah konflik perkebunan atau berada di kawasan hutan.

Apa Perbedaannya?

Data yang dibebankan di atas dapat diacu sebagai situasi keamanan yang dialami oleh masyarakat sebelum pandemi Covid-19. Meskipun keadaan sekarang termasuk genting dan seruan memperketat keamanan terdengar nyaring, tetapi temuan YLBHI pada 2019 seolah menyentil betapa rasa aman belum dicicipi betul oleh masyarakat, bahkan sebelum pandemi. Kehadiran negara tampaknya akan dianggap terlambat mengingat pemberian



keamanan dan perlindungan hak-hak warga kurang terpenuhi secara maksimal ketika wabah ini belum merebak.

Lalu, apa bedanya dengan situasi di masa pandemi? Pertanyaan itu mencuat untuk menarik perbandingan mengenai isu keamanan desa pada dua keadaan yang dianggap berlainan. Apabila kita percaya bahwa pembangunan dimulai dari desa, seharusnya perlindungan dalam menghadirkan rasa aman di desa penting untuk dibicarakan. Di samping itu, hak atas pangan dan sumber penghidupan pada dasarnya akan lebih terjamin di kala situasi tak menentu kini. Apalagi, pandemi juga sempat meneguhkan bahwa yang mampu menopang kehidupan kita adalah ekonomi lokal, bukan global. Namun, optimisme tersebut rasanya cepat layu ketika di tengah pandemi pun ancaman terhadap desa juga menguat.

Pihak-pihak yang selama ini berkonflik dengan masyarakat justru memanfaatkan situasi pandemi untuk mengambil alih lahan-lahan milik masyarakat. Sementara itu, negara tidak hadir dalam persoalan tersebut. Bahkan, aparaturnya memfasilitasi aksi perampasan dan kekerasan. Terkait persoalan ini, YLBHI menghitung telah terjadi 16 kasus perampasan lahan di wilayah yang berbeda-beda, sejak 2 Maret 2020 (tanggal diumumkannya pasien pertama Covid-19 di Indonesia) sampai dengan 2 Mei 2020. Satu kasus bisa melibatkan lebih dari satu desa.

Dari temuan kasus di atas, berdampak pada masyarakat sedikitnya di 20 desa. (“Badai Pandemi dan Perampasan Lahan: Catatan YLBHI Atas Peminggiran Keselamatan Rakyat oleh Negara”,

ylbhi.or.id). Dengan demikian, gambaran ini telah menunjukkan hampir tidak ada perbedaan situasi keamanan yang dialami masyarakat, baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi.

Ancaman dan konflik yang dialami oleh masyarakat di atas tampak kontraproduktif dengan upaya-upaya yang harus diambil ketika situasi pandemi. Padahal, desa menjadi penopang dalam ketahanan pangan, sementara mereka tidak merasakan keamanan terhadap sumber penghidupannya.

Kapan Warga Desa Merasa Aman?

Warga berhak mendapatkan rasa aman, baik secara fisik, psikologis, data dan ekspresi gagasan, serta kebudayaannya. Kapan situasi itu dapat dirasakan warga desa? Saya membaginya pada beberapa hal, antara lain:

Apabila tidak ada gangguan atau ancaman terhadap sumber penghidupan mereka, di mana mereka bisa melakukan aktivitas dengan nyaman. Namun, pandemi Covid-19 telah berdampak pada pekerjaan mereka, sehingga jaminan untuk tidak terganggu secara fisik dan psikologis amatlah penting dipenuhi.

Apabila tidak ada tindakan-tindakan kriminal yang meresahkan warga (pencurian, miras, narkoba, dll.). Tindakan kriminal dapat terpancing oleh keadaan yang menghimpit seseorang, seperti kehilangan sumber penghidupan. Maka, butuh tanggapan yang tepat



untuk menanggulangi masalah tersebut sehingga dapat mencegah adanya tindakan kriminal.

Apabila penegakan hukum berjalan dan mampu merespons situasi secara cepat serta adil dengan tetap memberikan tempat bagi keberlakuan hukum-hukum lokal. Namun, dari 16 kasus perampasan lahan yang dicatat YLBHI, tidak satu pun ada penyelesaian dari negara. Mereka yang telah kehilangan lahan tidak mendapatkan pemulihan. Salah satu contoh kasusnya berada di Jambi, ketika suatu perusahaan meracun tanaman warga menggunakan *drone*, tetapi tidak ada tindak lanjut yang berarti. Ini penting untuk memperoleh sorotan karena desa menjadi pelapis atas kebutuhan pangan masyarakat.

Berdasarkan refleksi atas pengalaman melakukan pendampingan kasus-kasus hukum, saya mencoba membuat pertimbangan-pertimbangan untuk membaca keamanan desa. Masing-masing desa mempunyai keunikan dan karakteristik berbeda-beda. Hal tersebut dapat diartikan bahwa keunikan dan karakteristik menentukan pula bentuk ancaman yang akan dihadapi, kecuali bagi beberapa desa yang saling memiliki kesamaan.

Ada delapan pertimbangan yang dapat dibaca, antara lain:

1. Historis dan struktural. Poin ini menyangkut penelusuran atas sejarah atau riwayat konflik suatu desa dan siapa saja yang menguasai sumber daya di desa.

2. Ketersediaan sumber daya. Apabila suatu desa punya ketersediaan sumber daya melimpah, model ancamannya akan berbeda dengan desa yang cenderung tandus.
3. Posisi dan letak strategis. Misalnya, ketika wilayah tempat tinggalnya ada di hutan, ancaman yang dihadapi bukan hanya berasal dari manusia—seperti terlibat dalam konflik lahan—melainkan juga harus berhadapan dengan satwa seiring menyempitnya ruang hidup.
4. Peradaban teknologi. Poin empat untuk melihat sejauh mana desa terpapar oleh teknologi.
5. Kehadiran organisasi masyarakat sipil (OMS). Pentingnya kehadiran OMS akan mempengaruhi tingkat keamanan masyarakat di desa. Apabila OMS yang bersangkutan mendorong adanya demokratisasi dan penegakan hukum di desa, tingkat ancaman terhadap keamanan desa relatif rendah, di samping memungkinkan adanya respon cepat dari penegak hukum atau pemerintah.
6. Pendidikan dan keterampilan. Dua hal tersebut mempengaruhi tingkat ketahanan sebuah desa.
7. Kemampuan swasembada. Misalnya, suatu desa memiliki kemampuan untuk swasembada cabai atau tekstil.
8. Afiliasi/relasi dengan kekuasaan yang sedang berlangsung.



Pertimbangan-pertimbangan di atas mengarahkan saya untuk memetakan tiga level ancaman. Berikut saya sertakan ke sebuah tabel:

| TINGGI (minimal 5 indikator terpenuhi) | SEDANG (minimal 4 indikator terpenuhi) | RENDAH (dianggap mengancam apabila 2 indikator terpenuhi) |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> -Melibatkan korporasi besar -Melibatkan pemerintah pusat atau daerah -Melibatkan “aparatus keamanan” (polisi, TNI, pamong praja) -Ada kekerasan -Kriminalisasi -Main hakim sendiri -Keberulangan -Ada korban (nyawa, hilangnya hak milik/sumber penghidupan) -Menjadi perhatian publik | <ul style="list-style-type: none"> -Melibatkan pemerintah pusat atau daerah -Melibatkan “aparatus keamanan” (polisi, TNI, pamong praja) -Ada korban (tidak sampai nyawa) -Kekerasan -Kriminalisasi -Main hakim sendiri -Melibatkan aksi premanisme -Keberulangan | <ul style="list-style-type: none"> -Melibatkan pemerintah lokal desa/kecamatan -Kekerasan -Ada korban (tidak sampai nyawa) -Main hakim sendiri cenderung tidak terjadi |

Temuan/Kondisi Objektif Desa

Basis YLBHI adalah bantuan hukum struktural, maka untuk melihat isu keamanan juga memakai kacamata hukum struktural. Temuan yang akan saya sematkan di bawah ini setidaknya merupakan

kondisi objektif desa, terkait ancaman fisik, psikologis, data dan ekspresi gagasan kebudayaan.

Klaim-klaim negara atas tanah yang dimiliki atau dikelola oleh rakyat telah memunculkan ancaman keamanan bagi masyarakat desa dalam mengolah lahan, dan bahkan kriminalisasi. Salah satu contoh serius ketika seseorang dijerat oleh Undang-Undang P3H, padahal sebelumnya telah kehilangan mata pencaharian.

Hampir 50% ancaman keamanan dengan tingkatan tinggi yang berakar dari konflik lahan disumbang oleh kebijakan pemerintah pusat. Ancaman keamanan warga desa sering datang dari aparat penegak hukum yang kerap menyalahgunakan kewenangan. Data konflik YLBHI semasa pandemi menunjukkan, lebih dari 87% ancaman keamanan di desa berakar dari konflik lahan yang melibatkan TNI-Polri secara aktif. Misalnya, keterlibatan TNI-Polri bisa jadi sebagai pelindung keamanan untuk aktivitas penggusuran oleh korporasi atau klaim yang diajukan pihak mereka sendiri atas suatu tanah.

Tingginya tekanan modal terhadap hak-hak atas tanah memunculkan konflik masyarakat. Akibatnya, rasa aman tidak dimiliki masyarakat desa dalam mengolah sumber penghidupannya. Bahkan, sering kali berujung pada kekerasan, konflik horizontal, dan kriminalisasi.

Penguasaan pihak ketiga/eksternal terhadap sumber-sumber daya lokal desa di tengah himpitan ekonomi masyarakat desa sering kali melahirkan persoalan keamanan turunan seperti narkoba atau prostitusi.



Menyempitnya kebebasan sipil di ruang *cyber* mengancam kebebasan berpendapat atau berekspresi masyarakat desa di ruang *cyber* seiring berkembangnya peradaban teknologi hingga ke desa.

Kekerasan seksual banyak terjadi, tetapi penegakan hukum cenderung lemah. Bahkan, mekanisme lokal sering kali tidak berpihak pada korban.

Apa Kebijakan Strategis yang Bisa Didorong?

Jaminan keamanan, baik fisik, psikologis, data dan ekspresi, akan terpenuhi apabila ada kebijakan strategis yang didorong pemerintah desa dan warga desa. Persoalan ini memicu pertanyaan, memangnya kebijakan strategis apa?

Langkah pertama yang bisa diambil dengan memberikan otonomi dalam menentukan arah pembangunan desa sesuai karakter masing-masing desa. Undang-Undang Desa sebenarnya sudah memiliki semangat tersebut, tetapi kenyataannya sering kali berbenturan dengan kebijakan lain yang diatur lewat instruksi langsung dari pemerintah pusat ke daerah.

Selanjutnya, perlu ada penegakan hukum yang efektif. Hal itu disertai dengan tetap memberikan jaminan perlindungan terhadap eksistensi institusi-institusi sosial di desa dalam membangun keamanan desa. Beberapa temuan YLBHI mengungkapkan, ketika ada masyarakat adat yang menegakkan hukum versi mereka atau

melakukan perlawanan balik dalam kisruh soal pertanahan, ada tuduhan yang menyebut mereka melanggar hak asasi.

Tuduhan terhadap masyarakat adat menyebabkan eksistensi kelembagaan menjadi terganggu. Padahal, kita tahu seharusnya turut mendorong kemandirian desa, termasuk menyelesaikan persoalan penegakan hukum di desa. Di samping itu, negara seharusnya juga memfasilitasi kelembagaan atau mekanisme demokratis yang hidup di masyarakat desa sejalan dengan nilai-nilai universal.

Terakhir sekaligus sebagai salah satu yang terpenting, Kementerian Desa harus tampil sebagai pelindung desa. Meskipun bagian dari pusat, tetapi setidaknya mampu memediasi desa dengan pusat. Sebab, selama ini ada kebijakan-kebijakan yang saling berbenturan satu sama lain.

Program-program Apa yang Bisa Diusulkan?

Saya mempunyai 6 usulan program untuk penguatan keamanan dan ketertiban habitus masyarakat desa. (1) Desa harus memiliki pengembangan pangkalan data warga secara terpilah dengan karakteristik lokal. Fungsinya bisa untuk menakar keamanan desa atau bekal awal dalam merumuskan suatu kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. (2) Negara atau desa harus memfasilitasi penguatan akses kepada sumber daya dan penguatan hak milik dengan memperhatikan karakteristik lokal. (3) Dialog-dialog kritis untuk mendorong sistem adat yang lebih demokratis



dengan nilai-nilai adat yang mengacu pada nilai-nilai universal dan mempertimbangkan keadilan ekonomi, keadilan sosial, dan keadilan ekologis. (4) *Mentoring* kesejahteraan rakyat melalui berbagai usaha yang didukung dan dimonitor dengan manajemen baik. Misalnya, mendorong setiap desa berproduksi dengan adanya intervensi nasional untuk mendorong swasembada, sehingga desa memiliki karakteristik produksi. (5) Mengembangkan “sistem imunitas” lokal berbasis sosial kapital desa. (6) Penguatan komunitas secara terpadu dalam usahanya untuk pemenuhan hak-hak kewargaannya sehingga mampu meningkatkan ketahanan masyarakat desa dalam mengatasi berbagai persoalan atau tantangan keamanan.[]



Profil Penulis

Komitmentnya pada hak asasi manusia (HAM), membuatnya tangguh menghadapi risiko atas pilihannya. Era Purnama Sari merupakan aktivis HAM sekaligus praktisi hukum. Terakhir dia tercatat sebagai Wakil Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Di antara beragam catatan kiprahnya, berita tentang Era dan kelompok tani dampungannya di Jambi cukup hangat diberitakan. Kelompok tani tersebut adalah “Serikat Mandiri Batanghari (SMB)” yang anggotanya merupakan Suku Anak Dalam Jambi. Mereka diberitakan mendapat kekerasan saat ditangkap aparat. Dan Era dipercaya sebagai delegasi pihak YLBHI untuk menginvestigasi kasus tersebut. Kepedulianya pada masyarakat marginal tumbuh saat kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang. Semasa kuliah, ia pernah melakukan advokasi untuk pedagang kaki lima (PKL) yang digusur. Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&CPK) memberi pengaruh besar kepada Era. Organisasi mahasiswa di lingkungan fakultasnya ini kerap melakukan koreksi dan kritisi beragam kebijakan kampus. Di masa itulah ia belajar bahwa banyak orang bisa keras mengkritik persoalan besar, tapi tidak banyak orang yang berani mengoreksi situasi di lingkungannya sendiri.





Menghadirkan Rasa Aman dan Ketertiban dalam Tataan Baru Desa di Era (Pasca) Pandemi Corona¹

Muhammad Najib Azca

Pandemi Covid-19 merupakan sebuah momentum untuk melakukan sebuah perubahan besar. Meminjam istilah dari

1. Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal 3 Juli 2020, Seri 5: Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Perlindungan dalam Tataan Indonesia Baru. Tulisan ini disarikan oleh Fiqih Rahmawati

Arundhati Roy², seorang seniman, novelis sekaligus pemikir, “*The pandemic is a portal*” atau pandemi adalah portal. Arundhati Roy dalam artikel yang terbit di Financial Times, mengatakan bahwa pandemi Covid-19 merupakan gerbang dari satu dunia menuju dunia selanjutnya.

Saya juga melihat bahwa pandemi merupakan disrupsi besar, sebuah gangguan yang mengancam normalitas kita. Normalitas merupakan perilaku normal bagi seseorang ketika konsisten dengan perilaku yang paling umum untuk orang tersebut. Ketika pandemi Covid-19 menghantam kehidupan bermasyarakat, perubahan-perubahan besar pun mengikutinya, termasuk normalitas itu sendiri.

Perubahan-perubahan besar biasanya terjadi karena hal-hal besar, seperti perang, perkembangan teknologi yang masif dan virus yang menyebabkan pandemi. Dalam catatan sejarah, masyarakat dunia pernah mengalami beberapa pandemi sebelum Covid-19. Dilansir dari Kompas.com³, pandemi yang pernah terjadi di antaranya, *Plague of Justinian* yang terjadi pada tahun 541, *Black Death* yang terjadi tahun 1347, *The Great Plague of London* pada tahun 1348-1665, hingga Kolera yang terjadi pada awal abad ke-19.

2. Roy, Arundhati. 2020. Arundhati Roy: 'The Pandemic is a Portal'. <https://www.ft.com/content/10d8f5e8-74eb-11ea-95fe-fcd274e920ca>. (diakses pada 8 Juli 2020).

3. Kompas.com. 2020. “Bagaimana 5 Pandemi Terburuk Dunia Berakhir”. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/20/070200223/bagaimana-5-pandemi-terburuk-dunia-berakhir-sejarah-mencatat?page=all>. (diakses pada 8 Juli 2020).



Momentum Transformasi Desa

Dalam konteks ke-Indonesia-an, pandemi juga menuntut kita untuk turut menjadikannya momentum guna melakukan transformasi secara makro sosial-politik. Selama pandemi berlangsung, setidaknya terdapat empat transformasi yang dialami oleh Indonesia.

Pertama, desentralisasi pemerintahan. Jika sebelumnya Indonesia cenderung dengan sistem pemerintahan yang sentralistik, pandemi ini secara tidak langsung mengubah sistem pemerintahan Indonesia ke arah desentralistik. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus kekuatan bersama untuk mempertahankan ketahanan masyarakat Indonesia.

Kedua, politik pembangunan berbasis desa. Politik pembangunan yang sebelumnya sangat berpusat di level atas, belakangan ini terlihat adanya kesadaran kolektif dari masyarakat untuk melakukan pembangunan berbasis desa. Program desa yang sebelumnya sudah ada harus terus dikelola, seperti dana desa hingga pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, level RT/RW dengan berbagai kesatuan keamanannya saat ini bisa menjadi ketahanan warga. Hal ini bisa menjadi momentum yang penting untuk bereksperimen dan berinovasi dalam konteks tata kelola kehidupan bersama.

Ketiga, modal sosial warga desa. Artinya, masyarakat desa yang ada memiliki peran sebagai modal sosial sekaligus sebagai basis resiliensi sosial di era krisis, khususnya di era pandemi



Covid-19 ini. Menurut Reivich & Shatte⁴, resiliensi diartikan sebagai kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan, dalam hal ini khususnya kehidupan bermasyarakat. Individu atau kelompok yang memiliki resiliensi akan cepat pulih dari kondisi sebelum trauma dan terlihat kebal dari peristiwa negatif seperti pandemi sekarang ini.

Keempat, solidaritas sosial. Solidaritas sosial merupakan satu hal yang penting untuk dijadikan bekal guna menghadapi masa pandemi. Solidaritas sosial di Indonesia termasuk tinggi, hal ini dibuktikan dengan adanya perlindungan diri yang dibentuk dalam kelompok-kelompok masyarakat desa. Kita bisa melihat, kemarin sebelum pemerintah memutuskan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), warga sudah lebih dulu menutup akses jalan umum dan hanya membuat satu jalan utama. Selain itu, banyak komunitas yang membagikan masker gratis, dapur umum hingga penyemprotan desinfektan.

Tantangan Sosial dan Keragaman Indonesia

Dilansir dari Katadata⁵, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada 2018 lalu Indonesia memiliki 83.931 wilayah

4. Amacon. Reivich, K., & Shatte, A. 2002. *The Resilience Factor: 7 Keys To Finding Your Inner Strength And Overcome Life's Hurdles*. New York: Broadway Books.
5. Katadata.co.id. 2019. "Berapa Jumlah Desa di Indonesia?". [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/13/berapa-jumlah-desadi-indonesia#:~:text=Berdasarkan%20data %20Badan%20Pusat%20](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/13/berapa-jumlah-desadi-indonesia#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20)



administrasi yang setingkat dengan desa. Jumlah ini masih terbagi ke dalam 75.436 desa, dengan 74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat; 8.444 kelurahan; dan 51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT).

Dari data tersebut kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki keragaman desa yang bervariasi dengan jumlah cukup banyak. Meski demikian, pada masa Orde Baru Indonesia sempat membuat penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional. Penyeragaman ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Terbitnya undang-undang tersebut kemudian membuat berbagai program pemerintahan juga muncul, entitas sosial desa coba diseragamkan sesuai dengan hasrat penyeragaman besar dari rezim militeristik.

Keragaman desa di Indonesia yang bervariasi juga ditandai dengan istilah-istilah yang dipakai di berbagai pelosok. Misalnya, di daerah Sumatera Barat menggunakan istilah nagari untuk menggantikan istilah desa dan kelurahan. Berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, nagari pun diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Selain itu, desa adat di Nusa Tenggara Timur bernama Wae Rebo juga menjadi bukti lain keragaman desa di Indonesia.

Statistik,Satuan%20Permukiman% 20Transmigrasi%20(SPT). (diakses pada 8 Juli 2020).



Dari konsep istilah tersebut, terdapat bentuk desa paling mutakhir disebut, dengan kampung digital. Konsep baru ini mulai berkembang dengan pola-pola komunitas kewargaan yang memiliki corak digital unik. Hal ini tak dapat dimungkiri, mengingat bentuk-bentuk digital sudah menjadi instrumen yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

Keragaman ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Jika tidak hati-hati, akan terjadi kerumitan besar yang bersifat destruktif. Dalam situasi pandemi, pemerintah betul-betul diuji perannya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban warga. Pemerintah diharapkan mampu menjadi agen yang bisa memberikan ketenteraman dan keamanan masyarakat. Namun, kenyataan berbicara sebaliknya, pemerintah justru menjadi sumber ketidaktenteraman dan ketidakamanan.

Keragaman Indonesia juga memunculkan corak tantangan bervariasi. Mulai dari tantangan yang bercorak lokal seperti isu perkelahian antar desa dan konflik komunal, hingga tantangan yang berdimensi global seperti pengaruh gerakan-gerakan transnasional.

Indeks Ketahanan Konflik Indonesia

Keragaman yang ada di Indonesia memiliki potensi kerawanan sosial. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan untuk menangani konflik di masyarakat.



Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dan *The Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTDDA)/UNDP*, melakukan riset dan kajian dengan membuat indeks mengenai Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal di Indonesia pada tahun 2014.

Indeks ini dirumuskan untuk memetakan tingkat ketahanan suatu daerah terhadap suatu konflik, sehingga pihak-pihak terkait dapat menyusun strategi berkenaan dengan permasalahan atau konflik yang dihadapi. Pada saat itu, kami mengambil sampel riset yang ada di 50 kabupaten dari 143 daerah tertinggal di Indonesia.

Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal di Indonesia ini kemudian menurunkan tiga aspek pokok yang menjadi indikator bagaimana sebuah daerah dapat dikatakan memiliki ketahanan konflik yang baik.

Pertama, Tata Kelola (*governance*). Semakin baik tata kelola suatu daerah, maka semakin rendah kerentanannya akan suatu konflik sekaligus semakin tinggi ketahanan atau ketangguhan daerah tersebut. Tata kelola ini diturunkan menjadi variabel mekanisme pencegahan inklusif, proses kelola cegah konflik nirkekerasan, dan institusi dalam pencegahan konflik.

Kedua, Kapasitas Kelembagaan, yang diturunkan kepada beberapa variabel seperti kualitas pelayanan publik dasar, kebijakan pemerintah daerah yang peka konflik, kinerja

lembaga penegak hukum dan keamanan, representasi politik masyarakat, dan kapasitas ekonomi daerah.

Ketiga, Ketahanan Masyarakat, yang terdiri dari dinamika masyarakat, *livelihood*, serta pendidikan dan budaya cegah konflik dan promosi perdamaian.

Ketiga aspek tersebut nantinya akan diturunkan lagi ke dalam level desa, supaya kebijakan-kebijakan yang dibuat mampu menciptakan program-program yang strategis.

Ketangguhan Komunitas

Dalam *Stockholm Resilience Centre*⁶, disebutkan bahwa ketahanan sosial merupakan kemampuan komunitas manusia untuk bertahan dan pulih dari tekanan, seperti perubahan lingkungan, pergolakan sosial, ekonomi, dan politik. Ketahanan dalam masyarakat dan ekosistem pendukung kehidupan menjadi sangat penting untuk mempertahankan pilihan guna pengembangan manusia di masa depan.

Ragam modal sosial menjadi pilar ketangguhan suatu komunitas. Menurut Woolcock⁷, dalam *Social Capital and Economic*

6. Stockholm Resilience Centre. Resilience Dictionary. <https://www.stockholmresilience.org/research/resilience-dictionary.html#:~:text=Social%20resilience%20is%20the%20ability,options%20for%20future%20human%20development>. (diakses pada 8 Juli 2020).

7. Woolcock, M. 1998. Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework. Theory and Society, dalam Ostrom, E. and Ahn, T.K. 2003. Foundation of Social Capital. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Ltd.



Development; Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework, modal sosial di masyarakat terdiri dari tiga bagian, yakni *social capital bonding* atau modal sosial terikat, yang biasanya ditunjukkan melalui nilai, kultur, persepsi dan tradisi adat istiadat masyarakat. Kemudian, *social capital bridging* atau modal sosial menjembatani, yang memiliki bentuk institusi atau mekanisme yang berlaku di masyarakat. Terakhir, *social capital linking* atau modal sosial menghubungkan.

Dari aspek ketahanan tersebut, terdapat dimensi penting yang di dalamnya terdapat pembelajaran sosial (*social learning*) serta kepemimpinan dan pemerintahan yang adaptif. Pemerintahan yang adaptif adalah pemerintahan yang mampu mengerti kebutuhan masyarakatnya secara progresif. Pemerintahan yang adaptif harus mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga ditemukan penyelesaian yang lebih efektif.

Kebijakan Strategis dan Program Andalan

Dari hasil riset Indeks Ketahanan Konflik Daerah di Indonesia, saya menurunkannya ke level desa. Apa yang harus dilakukan desa terkait konteks kebijakan strategis berikut program-program yang bisa menjadi andalan.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun tata kelola desa yang baik dan transparan. Sebuah desa yang dikelola dengan baik dan memiliki sistem pemerintahan yang kuat niscaya akan terbangun suasana dan situasi keamanan/ketertiban yang baik

pula. Dengan membuat tata kelola, unsur-unsur di dalam desa akan memahami bagaimana harus menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Tata kelola ini harus dilakukan secara adaptif dengan menuntut partisipasi berbagai kalangan. Sektor-sektor kehidupan yang sebelumnya tidak terlalu disentuh, seperti perihal lingkungan dan kesehatan, kini harus menjadi prioritas utama. Selain itu, perlu pelibatan warga dengan lebih maksimal. Program ini bisa dikelola dengan memanfaatkan media digital agar lebih efektif dan efisien.

Kemudian, langkah selanjutnya meningkatkan kapasitas kelembagaan desa. Meskipun Indonesia disusun dari komunitas yang beragam, penting untuk memperkuat solidaritas desa karena hal tersebut menjadi basis resolusi konflik di masyarakat.

Kapasitas kelembagaan desa perlu diberdayakan sekaligus diperkuat dengan kemampuan-kemampuan yang persuasif dengan mengombinasikan dimensi digital dan analog. Mekanisme lama seperti ronda dan impitan bisa terus dilakukan untuk memperkuat program ini.

Selain itu, memperkuat ketahanan atau ketangguhan masyarakat. Artinya, semua yang masuk dalam instrumen desa harus mampu memperkuat diri dalam berbagai aspek. Pandemi Covid-19 yang pada mulanya merupakan krisis kesehatan, karena masifnya memunculkan implikasi yang multidimensional. Permasalahan di luar bidang kesehatan juga turut terkena dampaknya, oleh karenanya kita harus memperkuat ketahanan masyarakat. Misalnya dalam



konteks pangan, desa bisa melakukan program-program untuk memperkuat ketahanan pangan.

Saya kira, hal ini harus disadari dengan sungguh-sungguh, bahwa masing-masing desa memiliki kekuatan yang lebih proaktif untuk menggalang potensi energi sosial dan modal sosial di masa pandemi. Meskipun modal sosial ini sudah lama tergerus oleh ekspansi kapitalisme dan neoliberalisme, harus ada proses untuk mengelolanya agar tidak menjadi hal yang destruktif.[]

Profil Narasumber

Semasa kuliah, ia sempat bermimpi menjadi dosen. Namun kemudian dia tanggalkan impian tersebut. Alasannya, saat itu dia melihat banyak dosen yang mengajar ala kadarnya dan tidak inspiratif. Namun, jalan hidup tetap membawanya menjadi dosen di Departemen Sosiologi, Universitas Gadjah Mada (UGM). Dr. M. Najib Azca Ph.D, sempat mengawali karir sebagai jurnalis Detik. Sebelum akhirnya menerima tawaran dari dosen penguji skripsinya, Yahya A. Muhaimin untuk mengajar. Saat itu, mantan Menteri Pendidikan 1999-2001 tersebut terpikat dengan skripsi Najib. Sejak itulah, selain mengajar di almamaternya, ia juga menjadi bagian dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM yang dipimpin Yahya. Meski telah menjalani rutinitas di kelas, Najib tidak bisa begitu saja melupakan aktivitas menulis. Apalagi saat mahasiswa, ia sempat menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Sintesa di pers mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM. Sampai sekarang ia masih rajin menulis dan melakukan riset. Terutama tentang isu kepemudaan. Kini, Najib juga dipercaya sebagai Direktur *Youth Studies Center* Fisipol UGM (YOUSURE). Posisi yang cocok dengan jiwa mudanya.





Poso: Mendekonstruksi Rasa Aman dan Tertib

Lian Gogali

Sejarah menunjukkan sumber daya alam selalu menjadi arena pertarungan lintas kepentingan, termasuk di dalamnya kepentingan dominasi penguasaan dan pengelolaannya. Penguasaan sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan kepentingan lokal dan nasional tetapi meluas pada lingkaran kepentingan internasional. Lingkaran kepentingan yang berpilin berkelindan dalam penguasaan pengelolaan sumber daya alam akhirnya berdampak pada proses-

proses penguasaan yang tidak demokratis bahkan cenderung merepresi, menggusur, dan menyingkirkan masyarakat. Proses penggusuran dan penyingkiran ini bukan hanya pada hak pengelolaan tetapi juga pada hak kepemilikan. Penguasaan sumber daya alam di Indonesia juga sering kali dimulai dan diikuti adanya konflik di dalam masyarakat.

Para ahli menyebut berbagai konflik yang terjadi di Indonesia dalam kategori-kategori sederhana seperti konflik agama, konflik etnis, konflik sosial, dan konflik (karena) separatisme. Wacana-wacana yang dibentuk, dipakai untuk menggambarkan konflik-konflik tersebut di atas pada akhirnya mengaburkan apa yang menjadi kepentingan sebenarnya dari sebuah konflik, yakni sumber daya alam. Wacana-wacana ini telah memproduksi gagasan atau konsep-konsep yang diyakini kebenarannya serta mendasari tindakan, dan mempunyai efek dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selanjutnya menjadi dasar legitimasi kebijakan penanganan konflik dari pemerintah. Hal yang disebutkan terakhir terlihat dalam wacana dominan tentang konflik Poso sebagai konflik agama dan wacana terorisme. Misalnya, wacana terorisme melegitimasi pembentukan Densus 88 Antiteror sekaligus berhasil memelihara wilayah Poso sebagai wilayah konflik dan sarang terorisme.

Dalam situasi keamanan yang tidak pasti, teror terhadap masyarakat menyebabkan tidak ada ruang untuk melakukan konsolidasi kekuatan yang melintasi identitas keagamaan dan suku. Keadaan ini menimbulkan kenyataan kurang kuatnya resistensi



masyarakat terhadap masuknya investor, tidak adanya transparansi dalam proses-proses penguasaannya, tidak adanya pengawasan atau kontrol dari proses awal kontrak hingga pengelolaannya. Masyarakat ditempatkan pada posisi untuk dilibatkan langsung dan tidak langsung pada pengalihan kepemilikan dan penguasaan. Jika masyarakat mengambil posisi untuk bertahan, maka intimidasi dan unjuk kekuatan dari aparat keamanan akan dengan mudah memenangkan para investor.

Saat ini, mayoritas kekerasan yang terjadi di wilayah mana pun di sudut dunia, terkait dengan sistem sebuah negara yang terkait dengan kapitalisme global. Ini dikarenakan kebutuhan produksi sumber daya alam suatu negara tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya alam mencukupi. Dalam hal inilah kebutuhan produksi, kekerasan aparat, dan pasar global memiliki keterkaitan, di mana pihak negara (dalam hal ini pemerintah) sering kali menjadi perantaranya. Mengutip konsep “market of violence” Georg Elwert (1999:41)

“by markets of violence I mean conflicts categorised as civil wars, warlord-dominated systems or banditry, where, beneath a superficial gloss of philosophical or power-political objectives or obligations to fight, ostensibly based on tradition, the economic motive of material profit dominates. Markets based on violence can come into being in areas which are open to violence – especially in the absence of a monopoly of violence.”

Berdasarkan teori Elwert, ketakutan harus terus dipelihara, baik dengan mengawetkan konflik maupun dengan mengawetkan citra bahwa sebuah daerah masih tetap sangat rentan konflik. Selanjutnya dituliskan (Elwert 1999: 45):

“A particular cost-effective form of mobilizing troops is to create fear. Hence, propaganda acts as an important instrument of production. From an economic perspective, this can give a point to what would otherwise be pointless violence. The fear of retaliation by the victim leaves no option open but to join an army or support it for one’s own protection. Fear of revenge stabilizes the system

Senada dengan teori Elwert, tulisan ini hendak menggambarkan keterkaitan antara dampak konflik Poso berupa eskalasi kehadiran aparat bersenjata—TNI dan Polisi, khususnya Brigade Mobil (Brimob) disertai dengan pendirian markas-markas aparat bersenjata di sepanjang wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali dan Banggai—dengan masuknya investor, untuk kemudian melakukan dekonstruksi atas konsep keamanan dan ketertiban. Tulisan akan diawali dengan kisah-kisah dari Poso yang tidak dibicarakan di media, kisah warga yang melakukan dekonstruksi atas rasa aman dan tertib.



Kisah-kisah Orang Biasa di Poso

Bakul Ikan Ibu Sarino dan Rasa Aman Warga

Sarino adalah satu dari puluhan perempuan asal Desa Tokorondo yang telah berjualan ikan sejak sebelum konflik Poso terjadi. Sarino berjualan ikan di bakul yang diletakkan di atas kepala dan berjalan dari satu desa ke desa lain. Saat konflik pecah, Sarino harus berhenti berjualan dan mengungsi. Tahun 2000 saat bom, penembakan misterius, penculikan, dan juga pembakaran di desa-desa masih terjadi, Ibu Sarino memutuskan kembali berjualan ikan. Bagi banyak orang yang membayangkan Poso dalam situasi kerusuhan, apa yang dilakukan ibu Sarino ini mungkin disimpulkan dengan satu kata: nekat.

Bagi Sarino, keputusannya kembali jualan adalah untuk tetap bisa hidup. Setelah hidup tanpa kejelasan berbulan-bulan di pengungsian di wilayah Parigi, Sarino dan keluarganya memutuskan kembali ke Poso. Mereka harus tetap makan dan melanjutkan hidup. Berjualan ikan adalah satu-satunya harapan Sarino. Lagi pula, menurut Sarino, dia meyakini ibu-ibu Kristen langganannya bukanlah orang jahat. Meski ditentang oleh sebagian besar keluarga termasuk suaminya, Sarino memutuskan tetap berjualan.

Sejak subuh, Sarino mulai berjalan kaki sejauh sekira enam kilometer, Sarino mendatangi keluarga-keluarga Kristen—Sarino seorang Muslim—langganannya di wilayah Kasiguncu dan

Tangkura. Bukannya tidak takut, tapi Sarino meyakini niat baik mencari rezeki diridhoi Tuhan, dan ia juga yakin orang Kristen yang akan dijumpai akan memperlakukannya dengan baik. Saat itu, pembunuhan misterius, penculikan, bom dan penembakan, hingga mutilasi masih terjadi di Poso. Kedatangan Sarino disambut dengan pelukan dan menjadi momentum warga untuk mempercayakan rasa amannya pertama-tama kepada sesama warga.

Sarino mendekonstruksi rasa aman itu melalui bakul ikan jualannya.

Mompaho Desa Malitu

Mompaho adalah tradisi tanam padi di ladang yang masih dilakukan sampai saat ini oleh warga desa Malitu, kecamatan Poso Pesisir. Tanam padi di ladang ini dilakukan dengan cara menugal sambil berjalan memutar melawan arah jarum jam. Dalam tradisi ini, warga Muslim dan Kristen saling mempercayakan ladang mereka pada yang lain untuk dikelola. Pada malam hari biasanya sebelum *Mompaho*, warga tanpa perlu dipanggil akan datang ke tuan rumah untuk memasak bersama. Masak bersama ini disebut *Mangore*.

Saling percaya ini mengakar sejak lama di Desa Malitu. Desa Malitu merupakan satu dari ratusan desa lainnya di Kabupaten Poso yang ikut dibakar saat konflik Poso terjadi. Untuk ke Desa Malitu, mesti melewati jalan kecil tak beraspal sepanjang delapan kilometer, jauh dari jangkauan jalan trans Sulawesi. Di desa ini, 99% warga



beragama Kristen, sementara sisanya beragama Islam. Saat konflik kekerasan di Poso, warga berkumpul dan melakukan musyawarah tentang keamanan seluruh warga tanpa terkecuali.

Musyawarah memutuskan warga Muslim akan diungsikan ke tempat yang lebih aman. Warga Kristen bersama-sama memasak menyiapkan bekal, mencarikan truk yang dijamin keamanannya, mengumpulkan tikar dan kebutuhan tidur seadanya. Diceritakan oleh tua-tua adat Desa Malitu, mereka melepas kepergian warga Muslim dalam doa agar tiba dengan selamat dan dapat kembali ke desa untuk berkumpul kembali. Warga Muslim diungsikan ke Koramil di Desa Mapane. Sementara warga Kristen bersama-sama mengungsi ke kebun dan hutan-hutan. Mereka melihat sendiri rumah-rumah mereka dibakar dari kejauhan. Warga saling berkomunikasi mengenai kondisi desa, memutuskan bersama untuk kembali ke desa. Warga Muslim kembali ke desa, demikian juga warga Kristen. Bersama-sama mereka membangun kembali rumah dan mulai berkebun bersama-sama. Dalam seri kekerasan di Poso yang masih berkelanjutan, warga Malitu mempertahankan pola saling percaya ini dengan mengungsikan warga Muslim, mengosongkan desa, dan kembali bersama-sama membangun desa.

Rasa aman warga desa diletakkan pada rasa saling percaya, menentukan bersama mekanisme rasa aman yang tepat dan menjaganya.



Mosango dan Wayamasapi

Mosango adalah tradisi menangkap ikan bersama-sama di Danau Poso. Alat tangkap *Mosango* disebut *Sango*, terbuat dari ruas-ruas bambu yang dianyam menyerupai kerucut. *Mosango* bisa dilakukan jika pesertanya berjumlah lebih dari 80 orang. Karena itu setiap kali *Mosango* dilakukan pada saat air Danau Poso surut, warga akan saling memanggil untuk bersama-sama menjalankan tradisi *Mosango*. Aktivitas *Mosango* tidak hanya soal mencari ikan bersama-sama tapi mengandung falsafah saling berbagi rejeki di air. Itu sebabnya setiap kali seseorang berhasil menangkap ikan di *sango*, akan disambut dengan teriakan riuh rendah dari seluruh *topo sango* (sebutan bagi mereka yang ikut *Mosango*) sebagai rasa syukur.

Sementara itu, *Wayamasapi* adalah tradisi menangkap ikan di mulut Danau Poso dengan menggunakan pagar dari bambu yang dibuat menyerupai eskalator. *Waya* berarti pagar, *Masapi* adalah jenis ikan sidat endemik Danau Poso. Pada setiap *Wayamasapi*, ada tujuh hingga sembilan keluarga yang bergantian berjaga setiap malamnya menunggu ikan *Masapi* terjebak di dalam *bubu* yang dipasang di *Wayamasapi*. Setiap keluarga yang menjaga di *Wayamasapi* percaya mereka saling berbagi rezeki, sehingga jika satu keluarga mendapatkan ikan pada malam hari sementara yang lainnya tidak mendapatkan ikan pada malam berikutnya, ini tidak menimbulkan kecemburuan.

Jumlah ganjil menjadi penting di *Sango* dan *Wayamasapi*. Setiap ruas bambu di *Sango* dan jumlah bambu di *Wayamasapi* akan



diikat pada angka ganjil. Para nelayan menceritakan filosofi ganjil dengan menyatakan bahwa yang genap hanya sang Pencipta yang memberikan anugerah melalui alam.

Baik *Sango* maupun *Wayamasapi* menunjukkan saling berbagi merupakan wujud dari ketertiban dalam masyarakat. Kedua tradisi ini bukan hanya menjadi simbol kebersamaan warga dalam pengelolaan sumber daya alam dengan konsep bersolidaritas dan berbagi, tapi juga menjadi prinsip dasar yang menjamin ketertiban di dalam masyarakat.

Posko Saling Jaga dan Kebun Bersama

Pertama kali diumumkannya Covid-19 sebagai bencana nasional, orang-orang tua dan anak muda di desa berkumpul bersama dengan pemerintah untuk memutuskan bersama langkah-langkah tanggap bencana. Langkah pertama yang diambil adalah membuat posko Saling Jaga , bekerjasama dengan Institut Mosintuwu menyediakan informasi dalam buklet yang sederhana tentang Covid-19. Posko Saling Jaga juga menyediakan alat pelindung diri sederhana serta disinfektan. Untuk menghindari simpang siur dan hoaks tentang Covid-19, bekerja sama dengan Radio Mosintuwu, radio komunitas yang diorganisir Institut Mosintuwu untuk menyampaikan informasi langsung pada desa tentang perkembangan terbaru Covid-19. Warga desa ikut melakukan reportase mengenai kondisi di desa melalui Radio Mosintuwu untuk saling berkoordinasi.



Ketika desa mulai kedatangan para mahasiswa dan pekerja yang bekerja di luar desa, warga desa berkumpul bersama memutuskan mengenai mekanisme pencegahan penyebaran penyakit dan memberlakukan isolasi mandiri.

Dalam proses penanganan pencegahan penyebaran Covid-19, para orang tua dan kelompok perempuan mulai membicarakan ketahanan pangan. Orang tua berbagi cerita pada kami tentang kemungkinan ancaman wabah kelaparan setelah wabah ini. Cerita ini diangkat dari pengalaman orang-orang tua dahulu saat wabah flu Spanyol terjadi di wilayah Danau Poso. Orang Poso mengenalnya dengan sebutan *jua lele*. Saat *jua lele* terjadi, pemimpin spiritual di desa (saat itu disebut *lipu*) memasang bendera putih di batas desa untuk menandakan tidak seorang pun bisa masuk atau keluar karena dianggap berbahaya. Kebijakan itu disertai dengan aktivitas menanam. Bersama-sama dengan warga desa, saat ini dikembangkan kebun bersama di desa-desa sebagai bentuk persiapan warga untuk menghindari ancaman kelaparan.

Rasa aman warga adalah rasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Ketertiban adalah hasil dari rasa aman warga yang berakar pada saling percaya.



Kebijakan Negara: Operasi Keamanan dan Ketertiban

Sejarah konflik Poso menunjukkan berbagai kebijakan penanganan konflik Poso berbasis militerisme malah melanggengkan dan memperluas konflik. Setiap kali terjadi peningkatan kekerasan di wilayah Kabupaten Poso, pemerintah memilih merespons itu dengan menambah jumlah aparat keamanan dengan berbagai operasi militer.

Operasi Keamanan Yang Berseri-seri

Penyebaran pasukan di sepanjang wilayah Kabupaten Poso dimulai sejak operasi-operasi militer digelar. Penyebaran pasukan polisi dan TNI ini secara efektif menciptakan suasana konflik yang berkepanjangan. Rangkaian jenis operasi militer ini digelar sejak meluasnya konflik Poso di tahun 2000. Berkembangnya konflik dan berubahnya pola konflik di Poso selalu ditangani dengan cara yang sama, yakni eskalasi militer.

| No. | Nama Operasi | Waktu | Satuan | Keterangan |
|-----|---------------------|----------------|------------------------------------|---|
| 1. | Operasi Sadar Maleo | 4 – 5/ 2000 | 14 Satuan SSK aparat TNI dan Polri | dari Satuan Polda Sulteng, Sulut, Sulsel, Kodam Wirabua-na. Ditingkatkan menjadi 23 SSK pada penghujung bulan Juli 2000 |
| 2. | Operasi Cinta Damai | 5—6/ 2000 | Satuan dari Kodam Wirabua-na | Kendali operasi tetap di tangan Polri |

| | | | | |
|----|---|------------------|---|--|
| 3. | Operasi Sintuwu Maroso | 7/2000 | 3000-an pasukan | Merupakan keputusan bersama Presiden dan Menkopolhukam, sebagai Operasi Pemulihan Keamanan Terpadu |
| 4. | Operasi Pemulihan Keamanan Terpadu Sintuwu Maroso I | 7—9/2000 | 2000-an pasukan | Pasca Deklarasi Malino, lanjutan operasi militer sebelumnya, tetapi di bawah kendali operasi daerah. Tercatat 46 pos penjagaan di 4 sektor wilayah, menghabiskan anggaran APBD Poso sebesar Rp6,7 miliar |
| 5. | Operasi Sintuwu Maroso 2—7 | 9/2000 — 6/2005 | 5000-an pasukan | Operasi Sintuwu Maroso diperpanjang hingga ke tujuh kalinya dengan alasan mandat masih perlunya pemulihan keamanan karena ancaman keamanan belum pulih. |
| 6. | Satuan Tugas Poso dan Operasi KOOPSKAM (Komando Operasi Pemulihan Situasi Keamanan) | 9/2005 — 7/2006 | 4000-an pasukan | Satgas dan KOOPSKAM dibentuk tanpa membubarkan operasi-operasi militer sebelumnya |
| 7. | Operasi Lanto Dago 1—6 | 7/2006 — 1/2007 | 4500-an pasukan | Penambahan pasukan perbatasan (Bawah Kendali Operasi) terus ditambah sepanjang operasi ini. |
| 8. | Operasi Siwagi Lembah | 11/2008 — 1/2009 | 400 personel khusus atau 4 SSK dari berbagai fungsi | Kehadiran mereka ditambah dengan pasukan organik dari Polres Poso, Polda Sulteng dan TNI yang memang sebelumnya sudah ada di wilayah tersebut. Keberadaan personel khusus ini disertai dengan isu penarikan pasukan BKO dari Poso. |



Jumlah personel terbanyak dalam sebuah operasi militer di Kabupaten Poso pernah mencapai 5000 personel dan yang terkecil 1500 personel.

Operasi keamanan di Poso berganti sandi dan masih terus berlangsung hingga saat ini:

| Nama Operasi | Tahun Operasi |
|---------------------|---------------|
| Operasi Sadar Maleo | 2012 |
| Operasi Aman Maleo | 2013—2014 |
| Operasi Camar Maleo | 2015 |
| Operasi Tinombala | 2016—sekarang |

Serangkaian operasi militer tersebut secara otomatis telah melegitimasi penyebaran penempatan pasukan-pasukan organik di seluruh wilayah Kabupaten Poso, di seluruh desa. Tidak ada satu wilayah pun yang terlewati. Pola Operasi yang dilakukan adalah dengan membuat pos-pos aparat Kepolisian atau TNI di sepanjang Trans Sulawesi, di sepanjang pintu masuk desa-desa di Poso dan di tengah-tengah desa. Sebagai gambaran, daerah penyebaran Pos keamanan di Poso pada tahun 2005 :

| No. | Kecamatan | Jumlah Pos | Personil |
|-----|----------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Poso Pesisir Utara | 6 desa/kelurahan | 55 personel |
| 2. | Poso Pesisir | 10 desa/kelurahan | 130 personel |
| 3. | Poso Pesisir Selatan | 8 desa/kelurahan | 88 personel |
| 4. | Poso Kota | 12 desa/kelurahan | 1655 personel |
| 5. | Lage | 11 desa/kelurahan | 54 personel |
| 6. | Pamona Selatan | 2 desa/kelurahan | 306 personel |
| 7. | Pamona Timur | 2 desa/kelurahan | 18 personel |
| 8. | Pamona Utara | 3 desa/kelurahan | 6 personel |

Wilayah inipun tidak luput dari pengiriman Detasemen 88 Anti Teror. Detasemen 88 anti teror atau Delta 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia yang dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom dan penyanderaan.

Polisi Masyarakat (POLMAS)

Tidak cukup dengan operasi militer, Polres Poso menyebar personelnya ke semua desa-desa di kabupaten Poso dengan kekuatan lima sampai delapan orang. Jumlah ini menurun menjadi empat sampai lima orang ketika mendapatkan protes dari masyarakat mengenai efektivitas Polmas. Program yang diadopsi dari Departemen Kepolisian Negara Bagian Amerika Serikat dan Kepolisian Nasional Jepang ini pada akhirnya menjadi sumber baru kekerasan dalam masyarakat.

Konsep Polmas sebenarnya lebih diperuntukkan sebagai pengawas masyarakat, sehingga mirip dengan Babinsa pada jaman Orde Baru, dengan dalih menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang dapat mengancam kamtibmas. Pihak Bina Mitra Polres Poso menyebutkan bahwa tugas pokok Polmas adalah membangun kemitraan dengan masyarakat dan menjadi *problem solving* komunitas wilayah atau kawasan tersebut. Tujuannya untuk mengurangi kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Petugas polmas adalah anggota Polri yang berpangkat bintara atau perwira.



Saat ini, 135 desa di Kabupaten Poso memiliki Polmas. Pos Polmas didirikan di tanah desa seluas dua area dengan bentuk bangunan tembok, lengkap dengan ruang-ruang khusus dan toilet, dan satu bangunan untuk tempat tinggal. Kecuali di Kecamatan Lore Utara, Lore Selatan, Lore Timur, Lore Tengah, Lore Barat, personel Polmas tetap berkantor dan tinggal di Mapolsek di mana mereka di tempatkan. Pos Polmas berisikan empat hingga lima personel polisi, dipimpin seorang Komandan (Kapolmas) berpangkat Briptu. Terhitung jumlah Polmas yang saat ini ditempatkan sebanyak 500 Polisi yang baru tamat pendidikan. Setiap pos Polmas dilengkapi dengan persenjataan, masing-masing satu buah senjata api laras panjang SS1 dan satu buah senjata laras pendek (Pistol) yang dipegang oleh Kepala Polisi masyarakat (Kapolmas).

Operasi Keamanan dan Ironi Rasa Aman Warga

“Apakah Poso sudah aman?” Pertanyaan ini menjadi pertanyaan pertama yang selalu ditanyakan warga di luar Poso jika berjumpa dengan penduduk yang berasal dari Poso dan tinggal di sana, atau kepada mereka yang baru saja berkunjung ke Poso. Keamanan yang diimajinasikan dari pertanyaan ini sangat dekat dengan peristiwa konflik kekerasan di Poso pada tahun-tahun sebelumnya, yang dilegitimasi dengan kehadiran operasi keamanan berjilid-jilid di Poso yang memberi tanda bahwa Poso tidak aman.

Beragam operasi keamanan di Poso menciptakan imajinasi masyarakat di luar Poso tentang terorisme sehingga menimbulkan

kesan serius bahwa wilayah Kabupaten Poso bukan lagi wilayah yang biasa-biasa saja situasi keamanannya. Sebaliknya wilayah Kabupaten Poso sudah masuk dalam wilayah kepentingan Internasional. Sehingga aksi sekecil apapun yang berkaitan dengan kekerasan, protes, usaha melawan (pun jika itu bermaksud untuk mempertahankan hak) bisa berbahaya. Keadaan ini pada akhirnya menimbulkan ketakutan dalam masyarakat. Ketakutan adalah situasi yang efektif bagi proses politik dan proses ekonomi yang mengabaikan kepentingan rakyat.

Petani dan masyarakat di kabupaten Poso menjadi kelompok yang paling merasakan dampak konflik 20 tahun lalu. Dampak itu akibat dendam sisa konflik yang bertransformasi menjadi tindakan kekerasan yang kemudian kita sebut sebagai aksi terorisme. Sejak tahun 2012, ketika kelompok MIT mulai menguasai gunung-gunung yang memanjang dari kabupaten Poso hingga Parigi Moutong. Para petani di kabupaten Parigi Moutong ikut jadi korbannya.

Data yang dikumpulkan Institut Mosintuwu dari pemberitaan di media massa menunjukkan, sejak 2012 sampai bulan Juni 2020 ada 20 orang warga yang sebagian besar petani meninggal dibunuh oleh kelompok DPO/MIT atau korban salah tembak oleh aparat keamanan.

Pada 2020, hingga bulan Juni ada lima orang petani di kabupaten Poso meninggal dunia. Tiga orang yakni, Qidam (9 April 2020), Syarifudin dan Firman (2 Juni 2020) karena salah tembak Polisi. Dua orang yakni Daeng Tapo (8 April) dan Ajeng (18 April) dibunuh kelompok MIT.



Tahun 2019 ada lima orang petani di kabupaten Parigi Moutong yang meninggal dunia. Peristiwanya terjadi pada 25 Juni 2019, korbannya adalah Tamar (50) dan anaknya Patte (27) jenazah keduanya ditemukan di dusun Tokasa, desa Tana Lanto, kecamatan Torue. Lalu 3 September 2019 tiga orang petani meninggal dunia, yakni: Wayan Astika (70), Simon Taliko (50), Cangklung (45), jenazah mereka ditemukan di desa Salubanga kecamatan Sausu dan desa Tolai kecamatan Torue.

Pada 31 Desember 2018, Ronal Batau, petani di desa Salubanga kecamatan Parigi Selatan dibunuh. Kelompok DPO/MIT kembali dituding sebagai pelakunya.

Tahun 2015, tiga orang petani di desa Tangkura kecamatan Poso Pesisir Selatan, Heri Tubio, Aditia Tetembu dan Dolfi Maudi Alipa dibunuh sepulang dari kebun pada 15 Januari. Peristiwa ini membuat warga di kecamatan Poso Pesisir Selatan ketakutan. Pasca pembunuhan itu, sampai sekarang hampir tidak ada lagi petani yang berani mengolah kebun mereka yang jauh dari kampung.

Tahun 2014, Lima orang petani di kabupaten Poso meninggal dunia dibunuh kelompok DPO MIT. Pada 20 September, Fadli (50) petani di desa Padalembara, kecamatan Poso Pesisir Selatan dibunuh di depan rumahnya dan di hadapan istrinya pada malam hari. Selanjutnya 12 Desember, dua orang petani warga desa Sedoa kecamatan Lore Utara, yakni Yunus Penini dan Obet Sabola yang sedang berburu babi hutan hilang. Saat pencarian dilakukan polisi dan warga hanya menemukan tombak dan barang-barang milik



keduanya. Diyakini, dua orang petani itu diculik dan dibunuh kelompok DPO MIT.

Masih di lembah Napu, pada tahun 2014, tiga orang petani di desa Tamadue kecamatan Lore Timur yakni Viktor Polaba, Gara Taudu dan Harun Tobimbi diculik kelompok DPO MIT ketika sedang mencari Damar di hutan tak jauh dari kampung mereka. Gara Taudu dan Harun Tobimbi kemudian dibunuh sementara Viktor Polaba berhasil melarikan diri.

Tahun 2012, pada 26 Agustus malam, Noldi Ombulandu, warga desa Sepe kecamatan Lage yang tengah berjualan durian di pinggir jalan meninggal ditembak orang tidak dikenal. Polisi menyebut pelakunya jaringan DPO MIT. Pada 5 Oktober malam, Hasman Sao, petani di desa Masani kecamatan Poso Pesisir, ditembak di dalam rumahnya oleh tiga orang bersenjata. Peluru mengenai lehernya, untungnya Hasman selamat. Polisi menyebut pelakunya adalah jaringan DPO MIT. 22 Oktober, seorang satpam BRI terluka akibat pecahan bom yang diletakkan di pos LLAJR di ujung jembatan Poso. Selain satpam, seorang anggota Polisi yang sedang berjaga juga terluka.

Selain kasus penembakan, ada juga laporan kasus penganiayaan. Pada 28 Desember 2012, empat belas orang warga desa Kalora dan Tambarana kecamatan Poso Pesisir Utara yang diperiksa Polisi pasca penembakan terhadap patroli Brimob di desa Tambarana—yang menyebabkan meninggalnya empat orang personil Brimob Sulteng—mengalami kekerasan. Selama proses pemeriksaan yang



berlangsung tujuh hari, Syafrudin, salah seorang di antaranya mengaku mengalami penganiayaan. Pihak Kepolisian kemudian memeriksa lima orang anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap mereka yang dituding mengetahui rencana penembakan terhadap para anggota Brimob itu.

Bagaimana dengan Polmas? Penempatan petugas Polmas yang semuanya berasal dari wilayah di luar Sulawesi (terutama Jawa) tidak mendapatkan tempat dalam masyarakat karena sulitnya adaptasi kultural dan kondisi emosional yang belum stabil di usia mereka yang terbilang belia untuk bisa dianggap sebagai *problem solving* masyarakat.

Konsep keamanan dan ketertiban yang digunakan negara dengan menggunakan operasi militer adalah konsep kepatuhan dan kedisiplinan tubuh dan juga pikiran. Kepatuhan untuk mengikuti petunjuk dan instruksi, kedisiplinan untuk tidak melakukan kritik dan protes atas pengrusakan alam, lingkungan, dan tradisi. Maka kemudian kata harmonis itu jadi slogan yang dipaksakan menjadi cara orang Poso menjalankan kehidupan masyarakat.

Cerita Sarino, tradisi *Mompaho* dari Desa Malitu, *Mosango* dan *Wayamasapi* menggambarkan bagaimana konsep keamanan dan ketertiban itu berakar pada solidaritas dan saling berbagi serta terikat pada alam dan pangan.

Rasa aman bukan soal tidak ada lagi perkelahian, tidak ada konflik, tidak ada kerusuhan dan seterusnya. Rasa aman melekat pada kehidupan sehari-hari, di mana petani bisa berkebun tanpa

takut dibunuh atas salah tembak. Ketertiban masyarakat lahir dari rasa aman yang demikian.

Bagaimana mewujudkannya? Langkah utama yang mesti dilakukan adalah dengan mengembalikan kepercayaan pada kekuatan lokal desa melalui aturan sosial, dan rasa solidaritas sebagai akar konsep keamanan dan ketertiban. Negara berfungsi memfasilitasi proses-proses itu dalam konteks hukum dan dalam birokrasinya.[]



Profil Penulis

Konflik Poso pada 2003-2004 memberi pelajaran penting bahwa perempuan punya peran vital dalam melahirkan perdamaian. Inilah hasil riset mendalam Merlian Gogali atau yang lebih dikenal dengan **Lian Gogali**. Aktivistis perempuan dan perdamaian asli Poso, Sulawesi Tengah. Keprihatinannya pasca konflik tersebut, mendorongnya mendirikan Sekolah Perempuan dan Institut Mosintuwu untuk perempuan lintas agama di Poso. Institut Mosintuwu didirikan pada 2009 dengan fokus pada peningkatan kesetaraan gender, agama, toleransi, dan perdamaian. Program lain yang digagas oleh Institut Mosintuwu adalah Project Sophia. Berupa perpustakaan keliling untuk anak-anak, sebagai jalan untuk membangun perdamaian di tingkat akar rumput. Meski keluarganya juga menjadi korban konflik tersebut, tapi baginya akar konflik harus diselesaikan. Dan itu butuh peran perempuan.

Berkat kiprahnya, ia menerima penghargaan Indonesian Woman of Change 2015 dari Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Dan tiga tahun sebelumnya, dia juga dianugerahi penghargaan Coexist Prize dari Yayasan Coexist, Amerika Serikat untuk usahanya mengembangkan dialog serta perdamaian antaragama dan keyakinan. Peraih gelar master di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta ini membuktikan bahwa pengalaman buruk juga bisa menjadi pupuk untuk menumbuhkan kebaikan.





Menghadirkan Keamanan di Tatanan Indonesia Baru: Refleksi Maluku¹

Nus Ukru

Rasa aman dan nyaman adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat. Dalam aktivitas sehari-hari, setiap individu atau komunitas memerlukan keamanan dan kenyamanan agar fungsinya berjalan

-
1. Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal 3 Juli 2020, Seri 5: Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Perlindungan dalam Tatanan Indonesia Baru. Tulisan ini disarikan oleh Berryl Ilham

dengan baik. Hal ini menunjang terciptanya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan hidup. Oleh karenanya, rasa aman dan nyaman adalah hak yang harus dijamin keberlangsungannya.

Dalam hidup bermasyarakat, tentunya selalu terdapat persinggungan. Entah itu permasalahan sepele maupun yang berat. Sejak penyelesaian konflik Maluku 1999, konflik antardesa tak lagi didominasi desa-desa yang berbeda agama. Deradikalisasi agama yang sudah dilaksanakan sebelumnya membuat sentimen agama tidak melulu jadi alasan permusuhan. Penyelesaian sentimen agama ini tak lain merupakan hasil kerja lembaga lokal yang bekerja mengatur keamanan warganya.

Kini, permasalahan pelik antardesa bisa dimulai hal-hal sepele seperti perkelahian pemuda mabuk, saling rebut wanita, atau bahkan sepak bola. Permasalahan yang mulanya hanya terjadi antarindividu, kemudian berkembang menjadi kelompok dan apabila tidak bisa dibendung akan menjadi permasalahan antardesa. Permusuhan ini kemudian sering menimbulkan permasalahan laten “konflik batas tanah”.

Pola konflik ini menjadi permasalahan yang sangat mengganggu rasa aman masyarakat karena bisa terjadi berulang-ulang. Usaha-usaha untuk membendung membesarnya masalah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang.



Pertanyaan utama yang mengemuka adalah bagaimana warga desa membentuk rasa aman dan nyaman untuk menjalankan aktivitas dan penghidupannya?

Desa yang Aman

Di tengah banyaknya perbedaan yang ada di bumi Indonesia, kemampuan untuk menerima keragaman adalah kunci kehidupan harmonis. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya yang bisa hidup berdampingan. Terdapat anekdot yang bisa menggambarkan keragaman Indonesia.

Suatu waktu seorang misionaris hendak menyebarkan agama Kristen di sebuah desa di Maluku. Si tuan rumah yang sudah memeluk agama Islam menyarankan si misionaris untuk pergi ke rumah saudaranya.

“Bapa pergi ke rumah saudara saya saja, dia belum beragama”, ujar sang tuan rumah lalu mengantar si misionaris ke saudaranya.

Kondisi penerimaan perbedaan ini masih terasa di berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi, perbedaan pendapat yang berujung konflik masih bisa ditemukan pula.

Pengelolaan konflik melalui keunggulan adat dan budaya (kearifan lokal) memiliki peran penting dalam keamanan masyarakat. Kearifan lokal ini merupakan produk budaya dari ratusan, bahkan ribuan tahun. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah tatanan adat adalah bukti bagaimana sebuah aturan cocok



untuk suatu daerah. Pengelolaan konflik dengan adat lokal akan membuat penyelesaian permasalahan menjadi lebih baik karena sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Dalam perjalanan sebuah budaya, perlu partisipasi aktif dari elemen masyarakat. Hal ini menuntut hal-hal substantif diutarakan dalam pertemuan-pertemuan warga. Sekadar kehadiran tidak memberikan perubahan signifikan untuk kemajuan sebuah komunitas. Partisipasi aktif inilah yang menjadi ekspresi budaya gotong royong. Seluruh proses ini menghadirkan gagasan kolektif yang lahir dari permusyawaratan.

Pemberian kesempatan bagi semua individu dalam mencurahkan pikiran juga merupakan bagian dari penghormatan atas individu tersebut. Dengan begitu, masyarakat sebagai sebuah komunitas menjadi lebih kuat karena didukung kedekatan dan kepercayaan. Setiap generasi dari proses saling menghormati ini akan memperkecil intervensi dari disrupsi apa pun yang sedang terjadi.

Waktu panjang dalam pembentukan adat istiadat adalah bukti bagaimana keadilan merupakan produk turunan di setiap generasinya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan demokrasi maupun keadilan ekonomi. Selain warga dapat mengutarakan pendapat secara bebas, akses terhadap kesempatan ekonomi juga perlu disediakan komunitas masyarakat. Hal ini bisa diterapkan dengan penerapan kebijakan oleh otoritas setempat. Saling berbagi dan menyisihkan sebagian untuk warga lain adalah sebuah tindakan yang masih kental di desa. Karena motif ekonomi personal atau

kelompok bisa diminimalkan, semua warganya bisa memperoleh kesempatan untuk hidup layak. Tidak adanya monopoli ini pun mengurangi potensi konflik di masa depan.

Satu hal penting yang menjadi ciri masyarakat desa adalah kedekatan spiritualitas. Lembaga lokal bisa melegitimasi sebuah kebijakan dengan dasar spiritualitasnya. Dalam praktiknya, upacara penghormatan kepada alam, larangan melakukan hal-hal buruk kepada sesama adalah produk spiritual sebuah budaya. Aturan-aturan yang menjadi produk lembaga spiritual ini dijalankan dengan khidmat karena mengandung kepercayaan sebuah komunitas. Di sisi lain, aturan tersebut melanggengkan hubungan antarmanusia dan manusia dengan alam sehingga keamanan dapat terjaga. Tradisi turun-temurun yang diciptakan lewat ajaran spiritual antargenerasi adalah bentuk usaha menciptakan kehidupan harmonis bagi generasi selanjutnya.

Kini, gempuran informasi menyerang masyarakat. Untuk itu, diperlukan kebijaksanaan baru dalam memilah dan mengelola segala informasi yang datang. Media sosial sebagai sarana tukar informasi bisa menjadi anugerah atau petaka. Dalam konteks keamanan, hoaks dan saling sindir jadi musuh utama. Keharmonisan sebuah komunitas bisa mendapatkan cobaan sebab celoteh seseorang yang tidak bijak dalam menggunakan gawainya. Di sisi lain, media sosial mampu mengumpulkan beberapa individu dengan kesukaan sama lalu membentuk komunitas baru.



Desa dalam Tatanan Indonesia Baru

Di sebuah tatanan Indonesia baru, terdapat beberapa perubahan mendasar yang diperlukan. Selain perubahan dalam ranah ekonomi, birokrasi, pendidikan, dan lain sebagainya, penting untuk merambah ke ranah keamanan dan kenyamanan warga.

Pemerintah desa sebagai lembaga pemilik otoritas dalam kehidupan bernegara adalah kunci untuk menuju tatanan baru tersebut. Di Maluku kebanyakan desa adalah desa adat yang sudah diakui. Sayangnya, desa-desa ini kurang terfasilitasi dalam menjalankan kewenangannya sebagai desa adat.

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana diatur dalam PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa (Pasal 37) belum maksimal berjalan.

Kewenangan hak asal usul di desa adat paling sedikit meliputi penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat, pranata hukum adat, kepemilikan hak tradisional, pengelolaan tanah kas desa adat, pengelolaan tanah ulayat, kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat, pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat, serta masa jabatan kepala desa adat.

Seluruh kewenangan ini seharusnya dijalankan pelaksanaannya oleh pemerintah desa dengan diawasi pemerintah kota/kabupaten. Sayangnya, perlu desakan masyarakat hanya untuk membentuk panitia masyarakat hukum adat.

Selain itu, pengelolaan lokal berskala desa juga perlu ditingkatkan implementasinya. Pengelolaan yang dimaksud adalah pasar desa, tambatan perahu, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, lingkungan permukiman masyarakat desa, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa dan taman bacaan, embung, air minum berskala desa, serta pembuatan jalan desa antarpemukiman ke wilayah pertanian.

Kewenangan-kewenangan yang sudah diatur dalam Undang-Undang ini mendapati tantangannya sekarang. Kecakapan penyelenggara pemerintahan perlu ditingkatkan agar hukum yang sudah ditulis bisa ditegakkan. Banyak sekali penyelenggara negara berfokus pada dana desa belaka. Padahal, permasalahan warga tidak akan selesai cuma dari pembangunan infrastruktur. Panitia hukum adat juga harus diberi wewenang dan pendampingan, bukan sekadar pelatihan membuat laporan keuangan atau menyusun anggaran.

Usul saya, proses Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa perlu dikembalikan ke desa melalui pendampingan pemerintah kabupaten/kota. Saat ini proses ini merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Banyaknya desa yang ada dalam satu kabupaten/kota tentu membuat proses ini sangat sulit dilaksanakan. Akibatnya, penguatan fungsi dan peningkatan kapasitas dari pemerintah desa untuk menjalankan kewenangannya tidak terfasilitasi.



Maka, dalam menyongsong tatanan Indonesia baru, peran pemerintah desa perlu ditingkatkan. Sistem adat yang menjadi dasar kehidupan sosial dan otoritas pemerintah desa harus berjalan berdampingan untuk menunjang ketenteraman dan ketertiban umum.

Peran pemerintah desa sebagai otoritas negara amat penting. Namun, peran kelembagaan lokal juga perlu digelorakan kembali. Penyeragaman sistem pemerintahan daerah saat Orde Baru membuat peran kelembagaan lokal ini seolah ditidurkan. Penyeragaman sistem ini mengacu pada pemerintahan lokal di pulau Jawa sesuai Undang-Undang nomor 5 tahun 1979. Padahal, kelembagaan lokal inilah yang merupakan akar dari struktur sosial masyarakat di daerah masing-masing. Pengebirian ini tak lain hanya akan membuat struktur sosial baru yang belum tentu cocok, apalagi dengan sistem yang disamakan di tengah keberagaman Indonesia yang begitu luas.

Struktur adat di Maluku sudah terbentuk sejak lama. Raja sebagai pemimpin tertinggi sebuah Negeri memiliki peran eksekutif sekaligus spiritual. Ada pula *Saniri Negeri* yang merupakan lembaga yang berperan mengayomi adat istiadat dan hukum adat. *Saniri* ini membantu Raja untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang ada. *Saniri Negeri* beranggotakan sekelompok orang yang terdiri dari kepala-kepala *soa*, yakni kepala dari beberapa marga (sebutan sistem kekeluargaan di Maluku yang pada umumnya berdasarkan garis keturunan ayah).

Struktur ini sangat efektif dalam pengaturan keamanan masyarakat desa di Maluku. Raja memiliki peran besar dalam penyelesaian permasalahan publik, baik masalah tanah, konflik dalam keluarga, maupun masalah lainnya. Raja di sini melaksanakan tugas sebagai eksekutor dan keputusannya sangat ditaati oleh masyarakat. Namun, proses diskusi, negosiasi serta mediasi sebelum keputusan itu dibuat ada di tangan *saniri*. Proses ini bisa berjalan karena seluruh elemen warga terhubung lewat marga, *soa*, dan *saniri*. Ini membuat proses penegakan hukum efektif dan mampu menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Setelah adanya penyeragaman di Orde Baru, terdapat elemen lain yang muncul begitu saja lewat aturan pemerintah pusat. Lembaga Musyawarah Desa (LMD) contohnya. Lembaga ini memberikan opsi diskusi, mediasi, dan negosiasi. Akan tetapi, komposisi keanggotaan LMD tidak lagi seperti sedia kala sehingga warga tidak merasa terwakili. Selain itu, terdapat anggota satuan teritorial Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang masuk ke desa-desa. Peran kedua satuan teritorial ini memotong proses penegakan hukum sesuai hukum adat.

Penegakan hukum melalui adat istiadat menuntut setiap elemen mulai dari ketua marga, *soa*, sampai raja untuk turun langsung ke masing-masing elemen adat untuk menegakkan hukum sesuai porsinya. Pemberian pelajaran moral kepada seluruh elemen terkait



individu bermasalah ini membuat setiap elemen menjaga anggotanya dengan baik. Semua bertanggung jawab atas perilaku anggotanya.

Kondisi berbeda saat satuan Babinsa atau Bhabinkamtibmas yang menindak. Individu bermasalah akan tercerabut dari sistem adatnya untuk ditindak langsung. Meskipun tugas utama kedua lembaga ini hanya terkait fungsi keamanan dan pencegahan dini terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat, tetapi pada faktanya peran mereka justru menjadi dominan dibanding pemerintah desa sendiri. Pemutusan hubungan individu dari identitas kulturalnya membuat kekuatan elemen lokal semakin tergerus. Kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas langsung atau tidak langsung telah melemahkan otonomi pemerintah desa dalam menjalankan kewenangannya, terutama yang terkait dengan urusan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Desa.

Di jalan menuju sebuah tatanan Indonesia baru, perlu dilakukan penyegaran kembali terhadap disrupsi budaya yang sudah terjadi di desa-desa. Indonesia sebelumnya merupakan negara dengan keragaman dalam slogan “Bhinneka Tunggal Ika”. Sayangnya, modernisasi atas nama pembangunan mencerabut adat dari warganya. Sebagai solusi, saya mengusulkan digalakkan pengembalian aktivitas kebudayaan adat di desa. Hal ini dapat dimulai kembali oleh pemerintah desa dan lembaga lokal agar harmoni relasi spiritual antarwarga maupun antardesa dapat tercapai.[]

Profil Narasumber

Selama ini masyarakat adat di Nusantara berjuang sendiri-sendiri dalam melawan perlakuan tidak adil atas hak mereka. Seperti penindasan, eksploitasi, dan perampasan atas hak-hak masyarakat adat. Dan Nus Uku merupakan salah satu orang yang gigih memperjuangkan hak tersebut. Sarjana Sosiologi, Universitas Pattimura, Ambon ini aktif sebagai fasilitator di beragam organisasi nonpemerintah. Termasuk mendirikan Jaringan Baileo Maluku dan Himpunan Maluku untuk Kemanusiaan (HUMANUM). Dia juga menjadi anggota Dewan Adat Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Perwakilan Maluku dan Maluku Utara. Meski bukan partai politik, namun AMAN mengeluarkan kebijakan strategi pemilu. Tujuannya untuk mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Selain itu, Nus juga menggeluti isu relasi masyarakat adat dengan hutannya. Karena mereka sudah mengenal dengan sangat baik hutannya, maka peran mereka akan memengaruhi masa depan hutan Indonesia.





Epilog

Kongres Kebudayaan Desa

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa

Oleh:

Ryan Sugiarto

(Ketua Penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa,

Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa)

Pengantar: Cerita dari Ruang Kendali dan Operasi

Tepat dua hari sebelum Idulfitri (24 Mei 2020), ruang Pusedalop (Pusat Data dan Operasi) Balai Desa Panggungharjo masih tampak riuh. Sejumlah anak muda mengoperasikan komputer,

mengelola sistem informasi, dan menulis modul mitigasi Covid-19. Ruang ini merupakan tempat konsolidasi dan mitigasi Covid-19 Desa Panggungharjo. Dari ruangan ini pula beberapa langkah mitigasi klinis dan nonklinis (sosial, ekonomi, keamanan) Desa Panggungharjo disusun untuk memandu seluruh *stakeholder* desa bersama-sama melawan Covid-19.

Desa Panggungharjo melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) mengajarkan bagaimana desa tidak harus melakukan *lockdown* total, tetapi justru menjadi pemecah masalah Covid-19. Desa Panggungharjo dalam situasi darurat telah melakukan serangkaian pencegahan dengan aksi tanggap melalui identifikasi kondisi klinis harian warganya, baik secara fisik maupun psikologis. Desa Panggungharjo berinisiatif menghadirkan pelayanan dari negara untuk penanganan Covid-19 dengan mengedepankan penggunaan teknologi melalui dua platform utama yakni Platform Laporan dan Platform Dukungan.

Selain mitigasi klinis, ekonomi, dan sosial, desa juga mentransformasikan dirinya sebagai representasi negara yang paling depan untuk mengorganisir segala sumber daya. Pemerintah desa aktif menggerakkan kemampuan kerelawanan warga mulai dari logistik hingga bantuan nonfisik. Warga juga didorong menjadi warga negara aktif untuk saling membantu sesama dengan prinsip *tanggung renteng*. Semua dilakukan berbasis data desa.

Dari sisi mitigasi ekonomi, *pasardesa.id* menjadi platform penting pengelolaan ekonomi di tengah pandemi dan sesudahnya.



Pasar desa menjadi *market place*—toko barang-barang warga desa—agar ekonomi terus berputar di desa, alih-alih lari ke luar desa. *Tagline* berbagi belanja menjadi napas lini ini.

Bagaimana dari sisi tata pemerintahan dan pengaturan hidup bersama warga? Kongres Kebudayaan Desa disusun sebagai panduan merevisi rencana pembangunan jangka menengah desa. Tepat dua hari sebelum lebaran, gagasan ini dilahirkan sebagai respons terhadap pandemi dan bagaimana hidup serta kehidupan warga desa kemudian dirumuskan. Selama 2 minggu awal, konsep dirumuskan, kerangka acuan kerja dituliskan, 18 tema sekaligus *term of reference* disusun, ide digelindingkan. Dan kita tahu gagasan ini menjadi gerakan bersama. Cukup banyak jejaring kemudian turut mengukung gagasan ini, membantu dalam implementasi, pewacanaan gagasan, hingga perumusan-perumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa. Pertanyaannya, kenapa Kongres Kebudayaan Desa?

Memahami Situasi di Tengah Pandemi

Bangunan kebudayaan Indonesia bukanlah sesuatu yang terberi (*given*) begitu saja. Kebudayaan Indonesia adalah hasil interaksi historis pelbagai kebudayaan nusantara, mulai dari Melayu, Jawa, Bugis, Papua, Aceh, dan suku bangsa lain yang hidup dalam ruang kultural dan sosial kepulauan nusantara. Interaksi historis kebudayaan Indonesia itu adalah bukti sejarah kebudayaan kita yang dinamis. Interaksi jalin menjalin antarkebudayaan-kebudayaan nusantara menghasilkan rona kebudayaan yang plural sebagai

kekayaan negara bangsa kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau di Indonesia yang terhubung melalui media laut, pelayaran, perdagangan, dan pertukaran-pertemuan antarkebudayaan sejak berabad-abad lalu. Jadi, generalisasi bahwa kebudayaan Indonesia adalah umum dan abadi perlu kita kaji ulang.

Perubahan kebudayaan menempatkan manusia menjadi ekosistem hidup yang sangat berkuasa dengan teknologi yang ia miliki: mengeksploitasi alam habis-habisan dengan kecenderungan besar merusaknya, alih-alih hidup berdampingan dengan alam dan memeliharanya. Dengan teknologi, manusia memproduksi barang yang tak diperlukan. Nilai barang pun ditentukan oleh kemasan. Sebagai contoh, air yang seharusnya dimiliki oleh publik berubah kepemilikannya di tangan korporasi yang memproduksi dan mengemasnya dalam botol-botol plastik. Pertambahan nilai inilah yang menyebabkan harga air menjadi jauh lebih mahal ketimbang nilai aslinya.

Rantai produksi-konsumsi manusia pun semakin panjang. Pola ini mengingatkan kita bahwa dunia telah bergeser dari paradigma *kosmosentris* ke paradigma antroposentris. *Kosmosentris* memandang alam sebagai sesuatu yang sakral. Kosmos yang sakral membuat hidup manusia tidak terpisah dari alam. Dengan demikian, pada paradigma ini, manusia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan karena alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari dirinya dan berada dalam pola relasi yang sederajat. Dalam paradigma antroposentrisme, manusia menjadi pusat segala sesuatu. Manusia sangat mengandalkan



rasionalitas dan subjektivitas yang individualis. Hal ini berdampak pada pola relasi manusia dan alam. Pola relasinya menjadi *subordinatif* dan *dominatif*. Alam tidak lagi dipandang sakral dan tidak menjadi bagian dari dirinya sendiri. Alam dianggap sebagai benda mati yang bisa diatur. Akibatnya, manusia seenaknya melakukan eksploitasi terhadap alam untuk kepentingan diri sendiri. Ujungnya, sistem ekonomi pun menjadi terbalik. Semula orang memproduksi untuk memenuhi kebutuhan, sementara sekarang sistem ekonomi berfokus menciptakan kebutuhan konsumsi (yang perlu atau tidak perlu) dan produksi pun mengikutinya. Akibat dorongan konsumsi yang selalu diciptakan dan produksi yang terus digenjut maka bumi kita pun menjadi korban. Bumi dieksploitasi habis-habisan. Kapitalisme neoliberal diamini meski bencana ekologis mengintip dan perlahan pasti datang.

Hari-hari ini manusia tengah menuai bencana itu. Sejak Desember 2019, pelan tapi pasti, dunia memasuki *retreat* yang panjang. Aktivitas berhenti, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi virus Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnnya. Alam menunjukkan taringnya, mengurung manusia untuk tidak serakah. Manusia kemudian menjadi resah: ekonomi, agama, teknologi, birokrasi terkendala luar biasa. Negara-negara yang sebelum Covid-19 memberi jarak pada pengaturan ekonomi dan memberikan tempat seluas-luasnya kepada peran swasta melalui kapitalisme neoliberal kini kembali memainkan kendali penuh meski akhirnya tampak keteteran dan merapuh. Birokrasi yang menjadi

kaki tangan negara macet. Semua orang frustrasi dan kecewa dengan gerak negara yang cenderung lamban berhadapan dengan Covid-19¹.

Di Indonesia, sejak pertengahan Maret 2020, seluruh pekerja kantor mengubah ritme kerjanya menjadi *work from home* (WFH). Kondisi ini menjadi pukulan telak di berbagai sektor kehidupan. Kelas menengah yang biasanya sibuk beraktivitas di berbagai tempat kini berdiam di rumah. Sektor informal bubar karena sepihnya aktivitas akibat pembatasan sosial berskala besar. Pekerja warteg, buruh bangunan, pedagang kecil, tukang parkir serabutan, pengemudi ojol dan taksi, sampai mal, kafe, gedung bioskop, hotel dan ruang-ruang diskusi serta seminar mengalami hibernasi. Saat roda ekonomi berhenti, risiko yang dihadapi ke depan semakin menyieramkan. Sebanyak 1,2-2 juta pekerja terkena PHK².

Angka kemiskinan yang sejak reformasi bergulir coba dikurangi, dalam sekejap naik berkali-kali lipat. Mereka yang sempat terangkat dari kemiskinan, akibat Covid-19 akhirnya kembali ke jurang kemiskinan. Bantalan dan jaring pengaman sosial diturunkan. Dana 110 triliun direlokasi menjadi bantuan sosial bagi masyarakat. Hingga 8 Mei 2020, 479 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Dari laporan ini, komposisi belanja daerah mengalami perubahan, yaitu adanya penurunan belanja barang/

1. Wibowo, A. Setyo. 2020. "Covid 19: Meditasi Heideggerian". Dalam *Majalah Basis*, Nomor 05-06, Tahun ke 69 2020, hlm. 11.

2. Wibowo, A. Setyo. 2020. *Ibid.* Lihat pula <http://www.cnbcindonesia.com/news/20200408213040-4-150737/bikin-merinding-12-juta-pekerja-kena-phk-dirumahkan>.



jasa dari 24,87% menjadi 20,86% dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%. Di sisi lain, ada kenaikan belanja lainnya, yaitu dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan untuk bansos dan belanja tidak terduga. Total belanja yang direalokasi dan *refocusing* sebesar Rp51,09 triliun, yang ditujukan untuk bidang kesehatan (Covid-19) sebesar Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,88 triliun³.

Selain dampak ekonomi, Covid-19 juga membawa dampak lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di seputar kita, juga pada orang yang kita belum kenal. Sebagai contoh, saat membeli makanan, baik di rumah makan maupun warung kaki lima, ada kecurigaan yang muncul. Apakah pelayan bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, apakah pekerja warung mencuci tangan pada saat mengolah makanan yang dipesan atau tidak, dan seterusnya. Keraguan pun muncul. Prasangka dan diskriminasi terus terjadi, bukan hanya karena apakah seseorang menderita Covid-19, melainkan juga karena identitas yang sudah melekat padanya. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Relasi berubah, perilaku pun demikian.

Di sektor pendidikan, sekolah dan kampus lumpuh. Seluruh proses pendidikan dilakukan dari rumah. Covid-19 menyadarkan

3. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/>.

kita bahwa pendidikan yang selama ini sepenuhnya ditanggungkan pada sekolah telah berubah dan dikembalikan pada intinya, yaitu pendidikan keluarga. Orang tua diajak kembali memperhatikan pendidikan anak. Anggapan bahwa sekolah sebagai penanggung jawab tunggal atas pengajaran kini direvisi total. Kondisi ini membuat seluruh tatanan keluarga berbenah. Mau tidak mau, keluarga diharapkan menjadi tangguh karena ia satu-satunya ruang yang dianggap aman secara fisik maupun secara psikologis dari Covid-19.

Wabah ini telah merenggut ribuan nyawa manusia dan membuat dunia panik, takut, dan cemas. Orang tak lagi mampu menguasai serta mengendalikan diri dengan menciptakan situasi yang kondusif. Orang cenderung responsif terhadap penyebaran wabah ini sampai-sampai melupakan orang di sekitarnya. Bahkan berita-berita hoaks oleh berbagai media pun akan dibenarkan karena setiap pribadi dihalusinasi oleh keadaan.

Pada bagian lain, tata kelola dan perlakuan kita terhadap alam harus direfleksikan ulang. Proyek modernitas yang menurut Immanuel Kant merupakan proses “pendewasaan manusia” harus dikritik agar proyek ini tidak terus-menerus merusak alam yang artinya merusak dirinya sendiri (manusia). Salah satu pendapat kritis muncul dari filsuf Fritjof Capra yang mengungkapkan keberadaan dan makna kehidupan manusia dalam segala tingkatan, baik pada level biologis sampai ke level ekonomis dan spiritual, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan alam semesta dan seluruh isinya.



Berdasarkan pandangan Capra, pandemi Corona adalah bentuk pembalasan alam terhadap manusia yang telah mengingkari dirinya sendiri. Dalam terminologi Jawa, kita mengenal *sapa nandur bakal ngunduh* ‘siapa yang menanam akan menuai’.

Covid-19 telah membuat peradaban manusia modern dikoyak-koyak menjadi tak berharga. Kehidupan manusia modern yang dibangun berdasarkan pada kecepatan gerak, *linearitas* berpikir, ketajaman rasio, kemenangan cara pandang individualis, dan perang teknologi kini lumpuh total di hadapan virus yang tak kasat mata. Kita baru sadar bahwa manusia modern adalah manusia-manusia rapuh. Peradaban politik, ekonomi, sosial di bawah bendera modernisme kini berada di titik nadir dan layak untuk kembali dipertanyakan ulang. Mau dibawa ke manakah kehidupan manusia dan bumi ini? Apakah kita sudah berada di arah membangun yang benar? Mungkin inilah waktu yang diberikan kepada manusia untuk mempertanyakan apa yang telah mereka jalani selama ini. Mungkinkah manusia sedang berada pada ujung kepunahannya?

Pandemi yang Mendekonstruksi dan Upaya Merumuskan Tatanan Baru

Fakta dan data virus Corona membuka sudut pandang bahwa ketidakpastian kognitif berhubungan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kepercayaan dan sikap. Dalam situasi ini, satu sama lain tidak mampu diatasi oleh perusahaan industri kesehatan.



Setidaknya sejauh ini positivisme juga fenomenologi belum mampu menjawabnya.

Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan manusia telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsepsi neoliberalisme luluh lantak oleh Covid-19. Ideologi sistem ekonomi pasar kapitalisme dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan kegagalan dalam membangun industri kesehatan untuk menghormati martabat manusia yang dibuktikan dengan langkanya alat-alat kesehatan. Di beberapa negara, industri tradisional mulai dilibatkan untuk menanggulangi kondisi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Sementara sosialisme juga tak mampu menawarkan apa pun dalam kondisi semacam ini.

Kesimpulannya, ideologi ekonomi dan paradigma pembangunan kesehatan manusia dengan fakta empiris data wabah virus Corona sama dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Bell dalam buku *The End of Ideology* (1960). Ia menuturkan bahwa ideologi *grand-humanistik* yang lebih tua, yang berasal dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah habis, dan ideologi baru yang lebih baik akan segera muncul. Daniel Bell berpendapat bahwa ideologi ekonomi, demokrasi, dan sistem politik telah menjadi tidak relevan di antara orang-orang yang “masuk akal”, dan pemerintahan masa depan akan didorong oleh penyesuaian dekonstruksi tatanan baru.



Maka perlu upaya dekonstruksi atas isme-isme dan instrumen pelaksanaannya. Tatanan baru pun mesti dirumuskan. Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida (1930-2004), *dekonstruksi* ditujukan kepada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekat kesedaran manusia. Dekonstruksi istilah gerak sosial dalam konteks bencana wabah justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial dan bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekat kesedaran masyarakat umum sebagaimana aktivitas jabatan, berpelukan, atau aktivitas fisik lain. Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan kepada aktivitas akal budi yang melibatkan segenap instrumen *ruhiah* meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru.

Selama ini, Covid-19 sering kali dinilai dari sisi negatif sebagai sebuah ancaman, tetapi satu hal yang luput dari kesadaran kita adalah bahwa wabah ini mendekonstruksi semua tatanan. Berangkat dari kenyataan bahwa pemerintah tidak membangun perencanaan yang baik dan selalu bergerak lambat, tata ruang itu kemudian diambil alih oleh swasta dan kekuatan modal. Tebersit di pikiran, “Apakah Covid-19 diciptakan bukan bebas nilai? Apakah ada sebuah gelombang baru pasca-Covid-19? Apakah ada sebuah upaya dekonstruksi dan konstruksi lain yang sudah disiapkan?”

Hipotesis

Dalam kondisi ini penting untuk setidaknya membangun gagasan alternatif dan konstruksi baru dalam relasi-relasi sosial kebudayaan. Selama 3-4 bulan bercengkerama dengan Covid-19 telah menyadarkan banyak hal. *Pertama*, kita tidak bisa hidup sendiri. Institusi sekolah dan agama tidak lagi penting dan keluarga menjadi sandaran akhir sekaligus juga awal dari segalanya. Nilai utama relasi sosial berasal dari keluarga hingga melahirkan etik baru dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya.

Covid-19 mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Maka hipotesis yang perlu dibuktikan adalah apakah puncak dari relasi sosial adalah gotong royong? Apakah puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama? Apakah puncak dari relasi politik adalah musyawarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin diuji dan dibuktikan dari serangkaian agenda Kongres Kebudayaan Desa. Dan kesemuanya itu tentu saja membutuhkan kesetaraan yang oleh Habermas dinamai sebagai *demokrasi deliberatif*. Rebut kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*. Dan hal ini tidak lepas dari nilai-nilai luhur nusantara, sehingga gagasan alternatif ini bercorak khas nusantara. Kita tidak lagi mengadopsi gagasan dari luar yang berjarak dengan konteks kita. Kita punya gagasan gotong royong, selain sosialisme dan kapitalisme.



Kongres Kebudayaan Desa

Kita telah mencermati, mengalami, dan berjibaku dengan Covid-19 dan kenyataannya hingga hari ini kita belum bisa keluar darinya. Namun, tidak ada kata menyerah di dalamnya. Perjuangan harus berumur panjang. Maka siasat-siasat kebudayaan perlu dirumuskan untuk mengelak dari kehancuran dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi, mengelak dari kepunahan manusia. Pandemi memberikan sisi positif bahwa manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitasnya harus mencari ruang “perlawanan” yang lebih baik. Menyerah berarti mengantarkan kematian dan hancurnya kemanusiaan. Maka tidak ada kata lain selain terus berjuang. Dan perjuangan itu harus dimulai dari desa, sebuah entitas negara yang paling dekat dengan warganya. Tidak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa.

Karena itulah perlu disusun serangkaian upaya untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat di era pandemi dan sesudahnya. Sekali lagi, dimulai dari desa. Apa dan bagaimana tatanan baru itu? Kongres Kebudayaan Desa (KKD) yang akan menjawabnya.

Kongres Kebudayaan Desa adalah pertemuan antara para pemangku desa (pemerintah desa, lembaga, komunitas, dan warga desa), para pemikir, akademisi yang memiliki ketertarikan terhadap isu desa ataupun bisa jadi lahir dan tumbuh dalam ekosistem desa, para praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan pekerja media yang



berupaya merumuskan kembali arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Kongres ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media. Kesemuanya akan berkontribusi untuk bersama-sama dengan warga desa merumuskan tatanan Indonesia baru dari desa. Kongres ini bergerak pada dua ranah sekaligus. *Pertama*, tataran konseptual dengan menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang menghasilkan dokumen-dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi. *Kedua*, tatanan praksis dengan menghasilkan dokumen panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa untuk desa-desa di Indonesia.

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa. Dua bagian ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Kongres Kebudayaan Desa sebagai bagian dari upaya serius untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan gagasan, rekognisi desa-masyarakat adat di Indonesia. Perayaan nusantara. Kongres adalah perayaan kebudayaan itu sendiri.



Maka tepat di sini jalinan dan upaya saling melengkapi antara bentuk kongres dan festival mewujudkan. Istilah *kongres* yang selama ini lekat dengan kesan serius dan penuh khidmat diubah menjadi sebuah perayaan. Pengertian *kongres* yang biasa dipahami sebagai bentuk pertemuan tertinggi, eksklusif, dan terpusat dari organisasi-organisasi sosial dan politik, kini dikembangkan menjadi semacam perhelatan dari ruang-ruang partisipasi masyarakat.

Maka festival kebudayaan ini didorong untuk merayakan dua hal sekaligus. *Pertama, culture experience*. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat lestari. *Kedua, culture knowledge* yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri.

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa

Desa adalah tempat di mana sebagian besar kita berasal. Karenanya kita lebih fasih membaca desa *tinimbang* Indonesia. Faktanya, desa lebih dulu ada dibandingkan Indonesia. Bahkan hingga hari ini kita masih selalu saja terbata-bata membaca Indonesia. Artinya kita perlu mengeja ulang Indonesia. *Reason d'etre* agenda ini adalah desa maka yang harus dieja ulang adalah Indonesia yang sudah



sengkarut. Apakah Indo-nesia, Indon-esia, Ind-one-sia, In-do-nesia ataukah akan kita sebutkan dalam satu tarikan napas: Indonesia? Artinya, tanpa (huruf) D-E-S-A, kata Indonesia tak akan sempurna.

Bagaimana cara kita mengeja ulang sangat tergantung dari kemampuan kita membaca desa sebagai ibu bumi. Desa menjadi sosok ibu yang *nuturing, ngopeni, ngrumat, ngemonah, nggulowentah, murakabi* semua anggota keluarga.

Lihatlah di masa pandemik seperti ini. Orang-orang desa yang merantau ke kota mengalami kecemasan. Ia yang papa tak diterima di lingkungan kota dan terusir darinya. Kota menjadi tidak ramah. Lihatlah bagaimana orang mencuri-curi cara agar tetap pulang kampung ketika kota tak lagi menyediakan kerja dan orang-orang kelas menengahnya mengurung diri di rumah. Mereka pulang ke desa.

Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi tempat kembalinya para petarung kehidupan yang harus rela meninggalkan desa untuk bekerja di ibu kota dan karena kondisi saat ini harus kembali pulang. Kembalilah ke pangkuan ibu bumi, selayaknya ibu. Desa akan menerima kehadiran kembali, apa pun adanya kita saat ini. Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi, tempat kembali dan berbagi.

Tema ini ingin menguatkan Indonesia dari desa. Dan tampaknya ungkapan “masa depan Indonesia adalah desa” semakin relevan. *Merdesa* berasal dari kata *desa* dalam bahasa Jawa Kuno, artinya ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa, suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat.



Dalam rumus *otak-atik gathuk*, ada persamaan antara *paradise* (surga) dengan *paradesa*, *para* (tertinggi), maka kedudukan desa diletakkan dalam *maqam*, derajat, dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian pembangunan surga di dunia nyata, yakni ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya, layak secara politik. Itulah sejahtera. Sedangkan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik: adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, *komunalitas*, berjemaah, tidak mudah mengumbar keserakahan dan eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, *dur-angkara*. Semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu manusia.”⁴

Karenanya, upaya menuju kemandirian desa menjadi bagian penting dari Kongres Kebudayaan Desa. Terwujudnya kedaulatan politik dan pemerintahan desa, kedaulatan perekonomian desa, kedaulatan data desa, adalah syarat desa sebagai “*paradise*”. Tata kelola pemerintahan dan warga desa dalam tatanan baru Indonesia dengan sendirinya harus memastikan tata kelola pemerintahan dan

4. Raharjo, T. 2013. “Menyambut Buku Indonesia Bagian dari Saya”. <https://www.caknun.com/2013/menyambut-buku-indonesia-bagian-dari-desa-saya/>.

kehidupan sosial warga yang bersih dan antikorupsi, sejahtera lahir dan batin, pendidikan yang merdeka, dan seterusnya.

Penekanan kongres ini selain mengkaji tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek kehidupan warga desa juga mengarusutamakan isu-isu antikorupsi. Membangun pemerintahan yang bersih dan politik yang bermartabat sangat mungkin didorong dari ruang negara yang lebih kecil, yaitu desa. Dan desa jauh lebih memungkinkan untuk menerapkan praktik tata kelola dan implementasi negara yang bebas dari korupsi.

Langkah yang lebih jauh, kongres ini berupaya memberikan tawaran alternatif untuk membangun kembali tatanan yang lebih setara, lebih adil, bermartabat, dan antikorupsi, serta model kehidupan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Tawaran alternatif tentang “*new normal*” akan mengisi ruang-ruang kosong tentang reproduksi pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang selama ini seolah direduksi hanya pada tataran tata cara teknis kehidupan (cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tawaran ini juga menyediakan seperangkat panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang bisa diadopsi oleh sebanyak mungkin desa di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah desa-desa adat beserta masyarakat adat di seluruh nusantara.



Kongres Kebudayaan Desa dalam Angka

Dua setengah bulan persiapan dan pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa (Juni-Agustus), memberikan gambaran-gambaran angka partisipasi berbagai *stakeholder* dalam KKD. Pertama, riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa tentang arah tatanan Indonesia baru dari desa. Riset ini merespons pandemi dan harapan warga desa. Sebanyak 1.231 responden telah terlibat dan memberikan pandangannya. Rentang responden bergerak dari berbagai provinsi dari Aceh hingga Papua. Pengambilan data yang menggunakan Google Form cukup mampu menjangkau jumlah responden, warga, dan pemangku pemerintahan desa. Dilihat dari komposisi gender, responden cukup seimbang.

Kedua, *call for papers* Kongres Kebudayaan Desa. Menyadari bahwa tidak semua gagasan dan keterwakilan bisa diringkus dalam 20 seri webinar, KKD membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrat, aktivis sosial, mahasiswa, dan siapa pun yang memiliki ikatan serta pemikiran tentang desa untuk *urun rembuk* tentang tatanan Indonesia baru. Sebanyak 57 naskah masuk melalui *call for papers* KKD. Jumlah tersebut tentu saja diseleksi secara ketat untuk bisa masuk dalam buku yang diterbitkan sebagai bagian dari *output* KKD. Hasilnya, sebanyak 31 naskah lolos kurasi dan berhak masuk dalam buku yang diterbitkan.

Ketiga, seri webinar KKD yang dilaksanakan dalam rentang 10 hari berturut-turut (1-10 Juli 2020), 100 jam webinar dengan 20

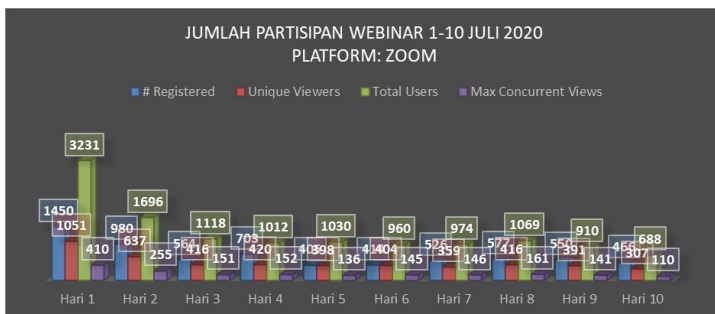


tema dan 20 *term of reference*, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuan dan keahlian.

Dua puluh tema webinar tersebut adalah: Seri 1. Arah Tatanan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; Seri 2. Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 3. Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; Seri 4. Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; Seri 5. Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Pelindungan dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif; Seri 7. Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 8. Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa di dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 9. Agama: Dari Ritus ke Substansi (Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru); Seri 10. Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; Seri 11. Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman Desa; Seri 12. Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru;



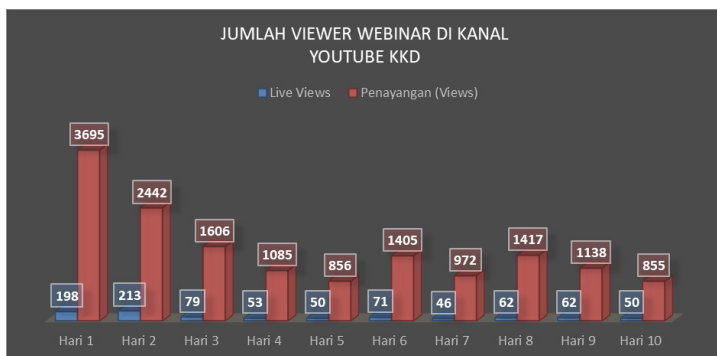
Seri 13. Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 14. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 15. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; Seri 16. Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 17. Kewarganegaraan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 18. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju Indonesia Baru; Seri Khusus Inklusi Sosial: Mewujudkan Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri Khusus Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.



Tabel 1 Jumlah Peserta Webinar Melalui Aplikasi Zoom

Dari sisi partisipasi seri webinar KKD menunjukkan angka partisipasi yang cukup besar. Dilihat dari data yang ditarik langsung dari aplikasi Zoom dan merupakan gambaran partisipasi webinar dalam satu hari, tabel berikut menggambarkan jumlah partisipasi webinar melalui kanal Zoom.

Selain melalui kanal Zoom, peserta juga bisa mengikuti keseluruhan seri webinar melalui kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa, baik secara *live* atau tayang ulang. Sampai tanggal 18 Juli 2020, berikut data penayangan video webinar Kongres Kebudayaan Desa:



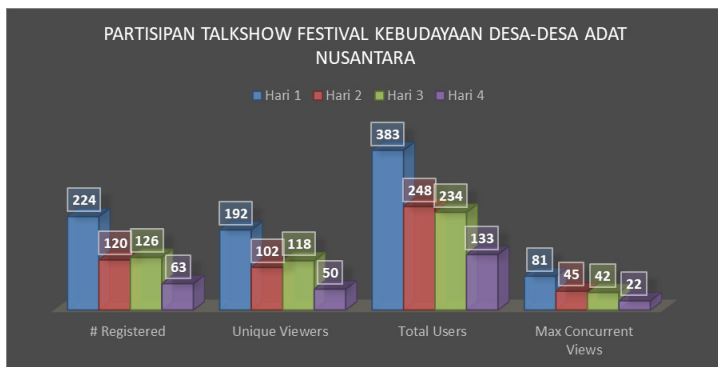
Tabel 2 Jumlah Peserta Webinar KKD Melalui YouTube

Selain ditayangkan melalui kanal resmi Kongres Kebudayaan Desa, serial webinar juga ditayangkan melalui kanal YouTube suara. com, *live* Facebook kata desa, bumdes.tv, Gatra.tv, kanal YouTube wiradesa dengan perkiraan *audience* lebih dari 10 ribu.

Keempat, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Festival ini membicarakan secara khusus gagasan dan pemikiran tentang



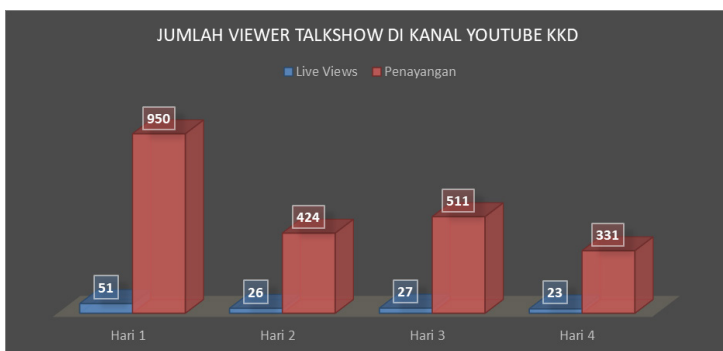
arah tatanan Indonesia baru dari perspektif desa-masyarakat adat di Indonesia. Ada 13 desa-masyarakat adat yang ambil bagian dalam seri *talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, yaitu: Desa Adat Boti, NTT; Desa Adat Papua; Desa Adat Sigi, Sulawesi Tengah; Desa Adat Baduy, Banten; Desa Adat Aceh; Desa Adat Minang; Desa Adat Melayu; Desa Adat Batak; Desa Adat Tidore; Desa Adat Dayak; Desa Adat Bajo; dan Desa Adat Sasak. Desa adat menyampaikan gagasan, pemikiran, serta praktik-praktik hidup dan penghidupan dalam konteks sehari-hari, misalnya tentang bagaimana membangun desanya masing-masing untuk memberi perspektif yang lebih besar bagi tatanan Indonesia baru. Ada 34 narasumber yang berasal dari 13 desa-masyarakat adat di Indonesia dan 8 moderator serta 8 video yang diproduksi untuk tiap-tiap *talkshow*.



Tabel 3 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via Zoom

Sama halnya dengan serial webinar Kongres Kebudayaan Desa, *talkshow* Festival Kebudayaan Desa juga ditayangkan langsung

melalui kanal YouTube resmi Kongres Kebudayaan Desa selama *talkshow* berlangsung. Selain itu, video *talkshow* juga diunggah ke kanal YouTube tersebut untuk memfasilitasi peserta yang tidak dapat mengikuti *talkshow* secara langsung. Berikut gambaran dari penayangan video *talkshow* Festival Kebudayaan Desa di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa sampai tanggal 18 Juli 2020.



Tabel 4 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via YouTube

Kelima, penerbitan buku. Rangkaian KKD ini menghasilkan 21 buku, terdiri dari 19 buku dari seri webinar, 1 buku bunga rampai strategi pemajuan kebudayaan nusantara, dan 1 buku putih (berisi hasil riset KKD dan panduan penyusunan RPJMDesa). Desain buku ini menggambarkan keseluruhan hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa. Sampul tiap-tiap buku adalah bagian dari peta Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang menggambarkan kekayaan endemik satwa dan tetumbuhannya. Salah satunya seperti yang tengah Anda baca sekarang ini.

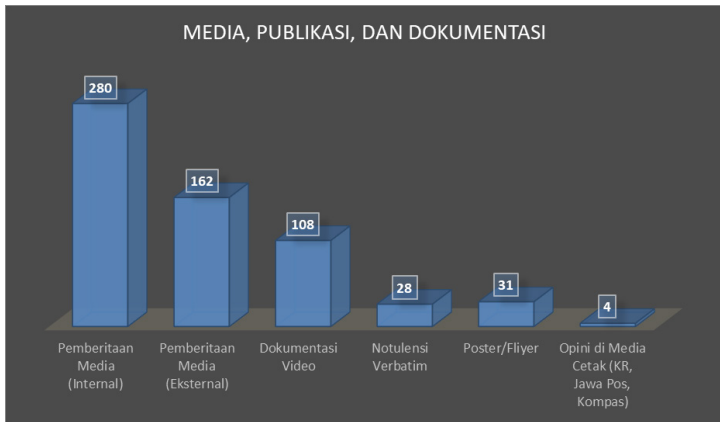


Keenam, buku putih Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa: Panduan Penyusunan RPJMDesa. Buku ini secara khusus merangkai hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa dan rekomendasi-rekomendasi yang selama pelaksanaan kongres terekam dengan baik. Selain itu buku ini juga merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan dari pembacaan atas diskusi/tanya jawab selama webinar, *call for papers*, maupun hasil riset.

Ketujuh, publikasi dan media. Ada 280 berita yang diproduksi oleh tim media KKD di laman www.kongreskebudayaandesa.id; 162 berita yang tayang di media nasional, baik *online* maupun cetak; 108 video dokumentasi yang diproduksi dan terunggah di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa; 35 poster untuk tiap-tiap agenda kongres; dan ada 4 opini yang dimuat di koran *Kedaulatan Rakyat*, *Jawa Pos*, dan *Kompas*. Keseluruhan agenda webinar kongres dan *talkshow* festival juga didokumentasikan dalam *notulensi* verbatim sejumlah dua puluh delapan. Dan sebanyak 35 poster publikasi mengantarai semua agenda kongres.

Seluruh aktivitas pemberitaan dimulai dari 22 Juni hingga 27 Juli (ketika naskah ini dituliskan), artinya rerata dalam 1 hari ada sedikitnya 12 berita, baik yang diproduksi oleh tim internal KKD maupun media-media nasional, baik cetak maupun *online*.

Hampir keseluruhan rangkaian Kongres Kebudayaan Desa menggunakan platform *online*. Karena itu kanal-kanal informasi juga berbasis *online*. KKD menggunakan *landing page* utama web, diseminasi juga didesain menggunakan media sosial. Berikut jumlah



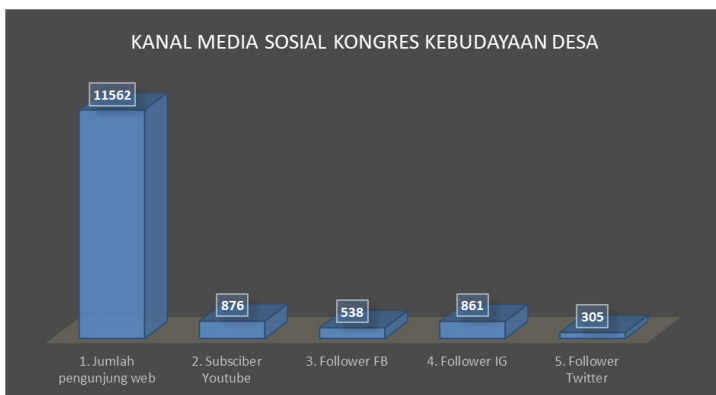
Tabel 5 Jumlah Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi KKD

jangkauan dari web utama dan media sosial yang digunakan selama pelaksanaan kongres. Catatan ini diambil tepat ketika epilog ini ditulis.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung www.kongreskebudayaandesa.id sejumlah 11.562 kunjungan, jumlah *subscriber* kanal YouTube 876, *follower* FB 538, *follower* IG 861, dan *follower* Twitter sebanyak 305. Angka itu dibukukan sejak 20 Juni 2020.

Kedelapan, dua kali “syukuran”. Di sela-sela pelaksanaan rangkaian kongres, penyelenggara menggelar dua *event offline*, yaitu Andrawina Budaya dan Suluk Kebudayaan. Andrawina Budaya dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta sekjen; Kiai Jadul Maula; serta berbagai jaringan pendukung kongres. Kedua, Suluk Kebudayaan yang digelar untuk memungkasi agenda Festival Desa-Desa Nusantara dan





Tabel 6 Gambaran Jangkauan Melalui Kanal Media Sosial KKD

menghadirkan budayawan Wani Dharmawan, Irfan Afifi, Nanang Garuda, dan lain-lain. Seluruh pelaksanaan agenda *offline* ini tetap menjalankan protokol kesehatan.

Kesembilan, jaringan kerja dan kepanitiaan. Kerja-kerja Kongres Kebudayaan Desa ini melibatkan 90 orang panitia penyelenggara yang terbagi dalam bagian-bagian kerja, mulai dari *steering committee*, tim LO, tim IT, tim festival, tim riset, tim *call for papers*, tim media, tim dokumentasi, tim buku, tim acara, tim perumus, tim administrasi dan keuangan, tim desain visual, tim medsos, tim konsumsi, tim *runner*, dan lain-lain. Selain itu pelaksanaan kongres juga didukung oleh 51 jaringan dan lembaga, dengan pendukung utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan GIZ. Secara umum kolaborasi

dari berbagai *stakeholder* ini dirumuskan ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community, government, finance*, dan media.

Kesepuluh, deklarasi arah tatanan Indonesia baru dari desa. Agenda deklarasi dibacakan Presiden Joko Widodo dua hari menjelang peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan para kepala desa dan seluruh rakyat Indonesia.

Mengintip Hasil Kongres

Hingga epilog ini ditulis, tim perumus hasil-hasil kongres masih bekerja. Tim mencermati seluruh proses webinar, *notulensi*, makalah narasumber, naskah-naskah *call for papers*, hasil penelitian, hingga melihat ulang tayangan yang tersimpan di YouTube KKD. Semua itu akan menjadi bagian dari buku putih arah tatanan Indonesia baru dari desa yang disusun dalam panduan penyusunan RPJMDesa. Buku ini terdiri dari analisis kebijakan terkait desa, *review* RPJMN, *probematika*, dan isu-isu strategis kemandirian desa; visi Indonesia baru, asas, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta indikator-indikator arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Dari sekian banyak rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa, klaster utama rekomendasi adalah mewujudkan kemandirian desa melalui tiga pilar: *pertama*, kedaulatan politik dan pemerintahan desa; *kedua*, kedaulatan perekonomian desa; *ketiga*, kedaulatan data desa. Tiga pilar kemandirian desa inilah yang akan diintrodusir untuk bersama-sama membangun gerakan kemandirian



desa. Jika 75 ribu desa bergerak untuk membangun kemandiriannya maka gelombang ini akan dengan sendirinya mampu memperbaiki kondisi negara. Masa depan Indonesia adalah desa. Detail hasil-hasil kongres bisa Anda simak di buku *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* (Panduan Penyusunan RPJMDesa).

Pada bagian akhir epilog panjang ini, kami hendak *menghaturkan* terima kasih *kagem* Bapak Dr. (H.C). Drs. H Abdul Halim Iskandar, M.Pd., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran Kemendesa yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, untuk dukungan yang luar biasa. Rasa terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Mbak Meta Yanti mewakili GIZ untuk semua diskusi dan dukungannya. Juga kepada segenap jaringan kerja Kongres Kebudayaan Desa dengan segenap dukungan dan bentuknya. *Matur nuwun.*

Ucapan terima kasih sungguh-sungguh pula kami sampaikan kepada seluruh moderator, narasumber, dan tentu saja sobat Kongres Kebudayaan Desa yang selama pelaksanaan kongres terus terlibat



secara aktif, baik sebagai responden riset, *call for papers*, maupun sobat kongres yang mengikuti webinar dan *talkshow* festival.

Rasa bangga disertai ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, inisiator Kongres Kebudayaan Desa, Lurah Desa Panggungharjo, beserta jajaran pemerintah desa yang terus *ngesubi* dan *ngemong* seluruh tim penyelenggara. Dan tentu saja kepada seluruh panitia penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk bersama-sama menyelenggarakan KKD serta mengemas gagasan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Sungguh sebuah kerja yang menyejarah. Untuk itu *matur nuwun*, terima kasih.

Akhirnya, semoga Kongres Kebudayaan Desa yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini memberi sumbangan yang besar kepada sebanyak mungkin desa juga kepada Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan *sakalangkong*, *matur nuwun*, *hatuh nuhun*, *matur suksme*, *amanai*, *muliate*, *tampiaseh*, *tarimo kasi*, *kurusumang'epanngawang*, terima kasih. Salam budaya desa. Panjang umur perjuangan![]

Senin, 28 Juli 2020

Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta





Deklarasi

ARAH TATANAN INDONESIA BARU DARI DESA

Mengingat kekuatan tatanan kehidupan masyarakat desa merupakan hasil pergulatan nenek moyang dalam menggeluti pengalaman kosmologis, *epistemologis*, dan ontologis sehingga filosofi desa adalah filosofi yang mewujud dalam budi pekerti, perilaku, dan tindakan; serta mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 maka kekuatan desa harus dijadikan modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi arah tatanan baru masyarakat.

Pandemi membuat manusia harus terus berjuang mencari ruang kehidupan yang lebih baik. Dan perjuangan itu telah dimulai melalui Kongres Kebudayaan Desa yang mengajak desa-desa Indonesia bergerak dan bangkit dengan kesadaran *kebhinekaan* dalam merumuskan tatanan baru bangsa Indonesia. Bahwa desa-desa yang membentuk ke-Indonesia-an harus membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*.

Bahwa tatanan itu lahir dari kekayaan sejarah panjang pengetahuan nusantara dan cara pandang jauh ke depan dengan kesadaran bahwa puncak dari relasi sosial adalah gotong royong, puncak dari relasi politik adalah musyawarah, dan puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama. Bahwa semua itu bersumber dari kekayaan kebudayaan desa dari Aceh hingga Papua.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur maka desa menyatakan cita-cita tatanan Indonesia baru dari desa adalah terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga.

Bahwa perwujudan tatanan Indonesia baru dari desa tersebut ditempuh dengan cara menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, menjadikan desa



sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan ekonomi dan *pemberkuasaan* desa melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kemandirian dan inovasi desa yang mampu mengelola kewenangan dan hak atas asal-usulnya, yang mampu memberikan *pemberkuasaan* pada warga desa. Kita berdoa memohon rahmat, hidayah, kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menyongsong Tatanan Indonesia Baru dari Desa.

Salam budaya desa. Panjang Umur Perjuangan.[]

Yogyakarta 15 Agustus 2020



KERABAT KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020

Dewan Pengarah

1. Wahyudi Anggoro Hadi (Ketua)
2. Rumakso Setyadi
3. FX Rudy Gunawan
4. Andreas Budi Widyanta
5. Eko Pambudi
6. Ilham Yuli Isdiyanto
7. Achmad Musyaddad
8. Ryan Sugiarto

PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN DESA

Ketua: Ryan Sugiarto

A. Strategis Business Unit: Sholahuddin Nur'azmy

Administrasi dan Keuangan

1. Ahmad Arief Rohman
(Koordinator)
2. Any Sundari
3. Rindy Widya Rasmono
4. Cintya Raffa Fathiya

Tim Media

1. Edy SR (Koordinator)
2. Ahmad Za'im Yunus
3. Ashilly Achidsti
4. Elyvia Inayah
5. Endah Sulistyorini
6. Gunawan Wibisono
7. Lutfi Retno Wahyudyanti
8. Vitus Kevinda Bramantya Viastra

Tim Humas

1. Muhammad Zidny Kafa
(Koordinator)
2. Aina Ulfah
3. Lina Listia

4. Nava Anggita Ardiana

5. Yesseta Novi Sukma

Tim Dokumentasi

1. Akhmad Nasir (Koordinator)
2. Amirul Mukmin
3. Annisa Suryantari
4. Ari Aji Heru Suyono
5. Khoiril Azmi
6. Shavira L. Phinahayu
7. Syaiful Choirudin
8. Veronika Yasinta
9. Windi Meilita W.

Tim IT

1. Muhammad Hanif Rifai
(Koordinator)
2. Ahmad Mizdad Hudani
3. R. Nurul Fitriana Putri
4. Adam Hanafi Syafrudin
5. Damar Saksomo Jati



B. Program: Aditya Mahendra Putra

Tim Webinar

1. Ambar Sari Dewi (Koordinator)
2. Angga Kurniawan
3. Emira Salma
4. Farhan Al Faried
5. Johan Visky Catur Aga
6. Okky Yayan Putra Armanda
7. Robi Setiyawan
8. Ruliyanto
9. Satrio Yoga Rachmanto
10. Tommy Destryanto
11. Toni Fajar Ristanto
12. Tri Muryani
13. Yusan Aprilianda

Tim Festival

1. Eko Nuryono (Koordinator)
2. Gundhi Aditya
3. Hardiansyah Ay
4. Linggar Ajikencono
5. Mona Kriesdinar
6. Nanang Garuda
7. Nandar Hutadima Idamsik
8. Nurohmad
9. Raliyanto Bw
10. Saptaji Prasetyo
11. Siska Aprisia
12. Very Hardian Kirnanda
13. Warsono

Tim Buku dan Call Of Papers

1. Faiz Ahsoul (Koordinator)
2. Ageng Indra Sumarah
3. Agus Teriyana
4. Ahmad Yasin
5. Amanatia Junda Solikhah
6. Asy Syaffa Nada Amatullah
7. Berryl Ilham
8. Chusna Rizqati
9. Citra Maudy Mahanani
10. Rheisnayucyntara
11. Dadang Ari Murtono
12. Diah Rizki Fitriani
13. Dwi Cipta
14. Dyah Permatasari
15. Fawaz
16. Fitriana Hadi
17. Fiqih Rahmawati
18. Gregorius Ragil Wibawanto
19. Irfan Afifi
20. Iswan Heriadjie
21. Ketjilbergerak
22. Kusharditya Albihafifzal
23. Prima Hidayah
24. Rio Anggoro Pangestu
25. Rofi Ali Majid
26. Suhairi Ahmad
27. Yona Primadesi





KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

